



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Sunan Muria No. 9 Kudus Kode Pos 59313

Telp. (0291) 438813 Faks. (0291) 437585

e-mail :dukcapil@kuduskab.go.id

website: dukcapil.kuduskab.go.id



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

A. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Maksud disusunnya LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2023 adalah sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang dan memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Tujuan disusunnya LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2023 adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Kinerja Tahunan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang.

A.1 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus merupakan perangkat daerah yang mampu pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pengelompokan organisasi perangkat daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala daerah, sekretaris daerah, dinas daerah, badan/fungsi penunjang, dan staf pendukung.

Ketentuan tersebut di atas selanjutnya ditindaklanjuti di setiap daerah kabupaten/kota, dimana untuk Kabupaten Kudus ditindaklanjuti melalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah, dan tidak berkaitan dengan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara). Guna melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Pemerintah Kabupaten Kudus telah membentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan

peraturan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus merupakan dinas tipe B, dimana termasuk kategori memiliki beban kerja sedang.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus merupakan dinas daerah tipe B, dimana tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang dijalankan berdasarkan pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 58 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus.

Kedudukan, susunan organisasi, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus.

a) Kedudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretraris Daerah (Pasal 2 ayat 1 dan 2).

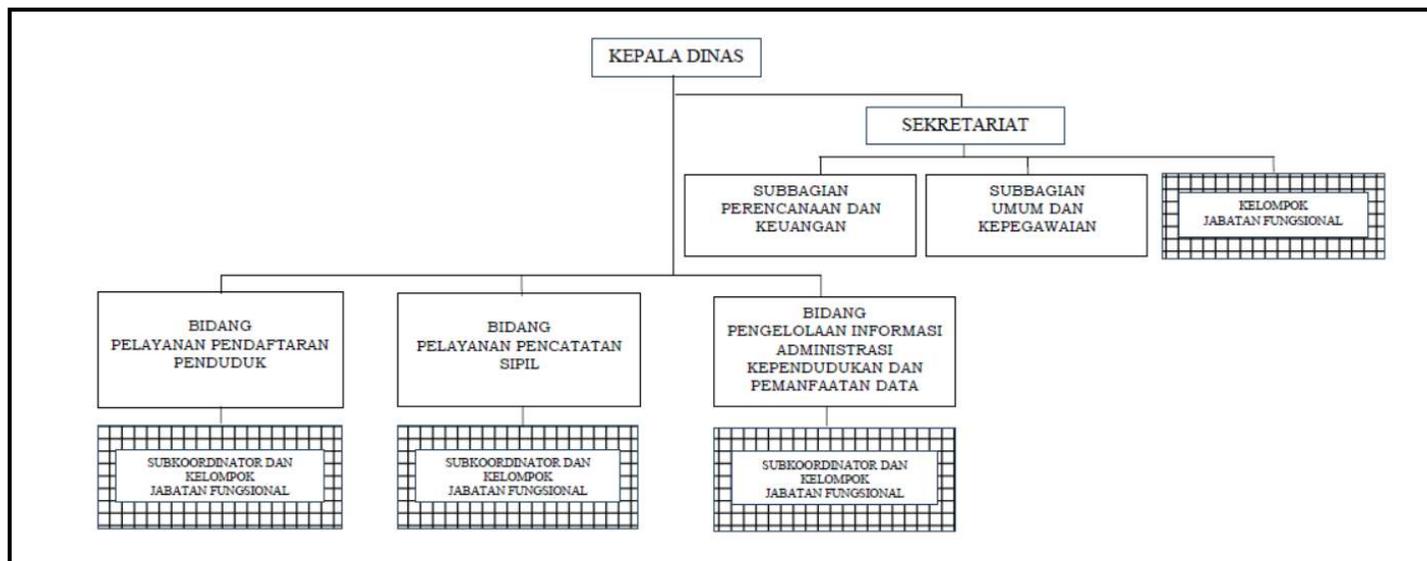
b) Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus diatur sebagaimana Pasal 3, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun susunan organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus secara lengkap sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1.1.

Gambar 1.1
 Bagan Susunan Organisasi
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus



Sumber : Peraturan Bupati Kudus Nomor 58 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus.

c) Tugas Pokok

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam pasal 4 yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

d) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus menyelenggarakan fungsi (pasal 5) :

- a. perumusan kebijakan Daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil ;
- b. penetapan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pengoordinasian perumusan program dan kegiatan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. pengendalian dan pelaporan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- f. penyelenggaraan administrasi dinas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

A.2 DUKUNGAN SUMBER DAYA

Keberhasilan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas serta berbagai program kegiatan yang dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia aparat yang tersedia. Per 31 Desember 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus didukung oleh 22 pegawai ASN, dan 2 PHD dengan komposisi sebagai berikut.

Tabel 1.1
Keadaan Jumlah Pegawai ASN Menurut Jabatan Struktural dan Staf
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus
Per 31 Desember 2023

NO	JABATAN STRUKTURAL	JUMLAH PEGAWAI
1.	Eselon II/b	1
2.	Eselon III/a	1
3.	Eselon III/b	3
4.	Eselon IV/a	2
5.	Pelaksana (JFU & JFT)	15
	JUMLAH	22

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kudus

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai ASN Menurut Bidang dan Sekretariat
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus
Per 31 Desember 2023

NO	BIDANG	JUMLAH PEGAWAI
1.	Sekretariat dan Kepala Dinas	9
2.	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1
3.	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	4
4.	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	6
	JUMLAH	22

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kudus

B. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

Berdasarkan Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017, dijelaskan bahwa “Isu Strategis adalah kondisi/hal yang harus diperhatikan/ dikedepankan/ diutamakan/ dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan pencapaian sasaran *penyelenggaraan pemerintahan daerah pada masa yang akan datang*”.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Isu strategis yang mendasar dan perlu dikedepankan dalam melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Kudus adalah **penyelenggaraan administrasi kependudukan yang cepat, tepat dan inklusif**. Saat ini pelayanan publik khususnya pelayanan administrasi kependudukan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat dan tepat sebagaimana harapan masyarakat dan mandatory pelayanan

publik yang prima. Selain itu penyelenggaraan administrasi kependudukan perlu dilaksanakan secara inklusif dengan menerapkan prinsip persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, baik bagi masyarakat umum dan berkebutuhan khusus, sehingga penyelenggaraan administrasi kependudukan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Isu strategis tersebut disebabkan oleh permasalahan utama/pokok yaitu **belum optimalnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan yang lengkap, dan pemanfaatan data.**

Tabel 1.3

Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Kudus Tahun 2018 s.d 2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA TAHUNAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk/KTP	99.17%	99.74%	99.18%	98.54%	97.67%
2	Cakupan kepemilikan kartu Identitas Anaka/KIA	NULL	21.81%	42.09%	60.55%	64.65%
3	Cakupan kepemilikan akta kelahiran	46.25%	48.21%	51.40%	56.17%	54.66%
4	Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-5 tahun	98.78%	99.33%	99.53%	99.46%	99.66%
5	Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	88.18%	92.18%	95.60%	98.16%	98.48%
6	Cakupan kepemilikan akta kematian	NA	NA	100%	100%	100%
7	Cakupan kepemilikan akta perkawinan	NA	NA	32.88%	42.53%	49.87%
8	Cakupan kepemilikan akta perceraian	NA	NA	NA	49.21%	57.13%
10	Persentase rata-rata kepemilikan 3 dokumen kependudukan utama (Jumlah kepemilikan KTP, Akta Kelahiran usia 0-18 tahun, Akta Kematian dibagi 3)	95.00%	97.31%	99.25%	98.89%	98.72%
11	Persentase rata-rata kepemilikan 6 dokumen kependudukan {(cakupan kepemilikan KTP + cakupan kepemilikan KIA + cakupan kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 tahun + cakupan kepemilikan Akta Kematian + cakupan kepemilikan Akta Perkawinan + cakupan kepemilikan Akta Perceraian)/6}	NA	NA	NA	74.83%	77.97%
12	Persentase Perangkat Daerah yg memanfaatkan akses data kependudukan sesuai standar	NA	NA	3.03%	18.18%	33.33%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kudus

Tabel 1.4
Identifikasi Permasalahan Utama/Strategis
Urusan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Kudus

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Stakeholder yang Berpengaruh
1	Belum optimalnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan yang lengkap dan pemanfaatan data kependudukan	Belum optimalnya pelayanan pendaftaran penduduk sebagaimana standar yang ada	1. Belum optimalnya pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan	Disdukcapil
			2. Minimnya sosialisasi pendaftaran penduduk	Disdukcapil; Diskominfo
			3. Kurangnya kapabilitas petugas tentang pendaftaran penduduk	Disdukcapil; BKPSDM
			4. Belum optimalnya pendataan dan pendaftaran penduduk rentan administrasi kependudukan	Disdukcapil; Pemerintah Desa; Dinsos; Lembaga Kemasyarakatan
			5. Belum optimalnya penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas / surat keterangan kependudukan	Disdukcapil; Kemendagri
			6. Belum optimalnya fungsi Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan terkait pelaporan peristiwa kependudukan, pendataan penduduk rentan, sosialisasi pendaftaran penduduk	Pemerintah Desa
			7. Belum optimalnya fungsi Lembaga Kemasyarakatan (RT, RW, PKK, Karang Taruna) dalam peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat terkait pelaporan peristiwa kependudukan, dan penduduk rentan.	Lembaga Kemasyarakatan
		Belum optimalnya pelayanan pencatatan sipil sebagaimana standar yang ada	1. Belum optimalnya pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.	Disdukcapil
			2. Minimnya sosialisasi pencatatan sipil	Disdukcapil; Diskominfo
			3. Data pencatatan sipil tidak akurat	Disdukcapil
			4. Kurangnya kapabilitas petugas tentang pencatatan sipil	Disdukcapil; BKPSDM
			5. Minimnya fasilitasi pelayanan pencatatan sipil dan serta belum optimalnya stelsef aktif petugas pelayanan pencatatan sipil	Disdukcapil; Pemerintah Desa
			6. Belum optimalnya fungsi Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan atas pelaporan peristiwa penting, sosialisasi pencatatan sipil.	Pemerintah Desa
			7. Belum optimalnya fungsi Lembaga Kemasyarakatan (RT, RW, PKK, Karang Taruna) dalam peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat terkait pelaporan peristiwa penting	Lembaga Kemasyarakatan
			8. Belum optimalnya koordinasi pelaporan dan pemutakhiran data peristiwa penting penduduk (Dinas Kesehatan, Kemenag, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri)	Dinas Kesehatan; Kemenag; Pengadilan Agama; Pengadilan Negeri
Kualitas data kependudukan skala kabupaten belum akurat, lengkap, mutakhir dan berdaya guna	1. Belum optimalnya pemutakhiran dan sinkronisasi data kependudukan	Disdukcapil; Kemendagri		
	2. Masih kurangnya Perangkat Daerah yang menggunakan hak akses data kependudukan	Disdukcapil; Kemendagri; Diskominfo; OPD lain terkait		

	Belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi di internal Dinas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum efektifnya Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Bagian Organisasi 2. Belum optimalnya pendampingan pelaksanaan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat 3. Roadmap Reformasi Birokrasi sulit di implementasikan dan belum adanya role model pelaksanaan Reformasi Birokrasi 	Disdukcapil; Setda; Inspektorat Setda; Inspektorat Setda; BKPSDM; Diskominfo; Inspektorat; Bappeda; Dinsos
--	---	---	---

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kudus

Belum optimalnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan yang lengkap disebabkan oleh masalah belum optimalnya pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil sebagaimana standar pelayanan prima yang harus dipenuhi; belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi di internal Dinas; serta kualitas data kependudukan skala kabupaten belum akurat, lengkap, mutakhir dan berdaya guna.

Data kependudukan belum sepenuhnya berdaya guna dimanfaatkan oleh Instansi/Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus dalam rangka optimalisasi pelayanan publik yang saling terintegrasi. Hal tersebut tampak terlihat ketika terdapat perbedaan data kependudukan pada Instansi/Perangkat Daerah yang memberikan akses pelayanan publik, sehingga hal tersebut menjadi kendala oleh masyarakat dalam mengurus pelayanan publik. Data penentuan target pelayanan dasar dan perlindungan sosial telah berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), akan tetapi masih banyak penduduk yang belum melaporkan, menyelaraskan, dan melakukan pemutakhiran elemen data kependudukan berdasarkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang terjadi dan dialami oleh penduduk itu sendiri. Hal tersebut mengakibatkan pemberian pelayanan dasar dan perlindungan sosial terkendala dengan keserasian data kependudukan yang akurat, lengkap dan mutakhir.

Beberapa masalah tersebut di atas, disebabkan oleh berbagai akar masalah baik yang bersumber dari internal maupun eksternal yang mempunyai saling keterkaitan dan hubungan timbal balik sebagaimana tersebut pada Tabel 1.4 di atas.

C. Landasan Hukum

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023;
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus;
4. Peraturan Bupati Kudus Nomor 66 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kudus;
5. Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023;

6. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Nomor 050/013/14.00/2023 tentang Perubahan Keputusan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Nomor 050/017/14.00/2022 tentang Rencana Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2023;
7. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Nomor 050.3/003.3/14.00/2023 tentang Pembentukan Struktur Pengelola SAKIP Di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus;
8. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Nomor 050.3/003.4/14.00/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Internal AKIP Di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus;
9. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Nomor 000.8.6.3/015/2023 tentang Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja Di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus.

D. Sistematika

Sistematika penyusunan LKJiP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi, landasan hukum, dan sistematika penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Dijelaskan mulai rencana strategis,

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini menguraikan capaian organisasi, dan realisasi anggaran.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran Meliputi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan lampiran pendukung lainnya

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

A.1. VISI DAN MISI

Proses perencanaan pembangunan jangka menengah telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus dengan disusunnya Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023. Berbeda dengan Renstra OPD tahun sebelumnya, bahwa di dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 tidak lagi merumuskan visi dan misi OPD. OPD terkait melaksanakan visi dan misi Kepala Daerah terpilih sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Visi Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 adalah *“Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera”*. Makna yang terkandung di dalam visi tersebut adalah agar Kabupaten Kudus menjadi pusat pembangunan daerah sekitarnya, yang dilengkapi dengan fasilitas modern didukung masyarakat yang religius untuk mencapai kehidupan sejahtera.

Adapun upaya-upaya yang diperlukan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 untuk mencapai visi tersebut, dituangkan melalui 4 (empat) misi utama, yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia.
2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik.
3. Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif.
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing.

Misi terkait yang dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus adalah misi ke 2 (dua) yaitu mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik.

A.2. TUJUAN DAN SASARAN

Di dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 dirumuskan tujuan, sasaran dan arah kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun.

a. Tujuan Strategis

Tujuan pada dasarnya merupakan pernyataan tentang apa yang perlu dicapai untuk mencapai visi, misi dan mengatasi isu yang dihadapi. Tujuan dirumuskan berdasarkan pendekatan spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan berorientasi hasil dan jangka waktu pencapaian yang jelas.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus untuk jangka menengah pada tahun 2018-2023 yaitu **meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan.**

Kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan yang meningkat menggambarkan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik administrasi kependudukan telah sesuai dengan ketentuan dan Standar Pelayanan Publik yang diiringi dengan semakin meningkatnya

kepemilikan dokumen administrasi kependudukan. Semakin tinggi dan baik kualitas penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan, maka penduduk akan semakin memahami arti pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan, dan semakin mudah dalam melakukan pengurusan dokumen administrasi kependudukan. Dokumen administrasi yang menjadi prioritas isu nasional adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran (prioritas usia 0-18 tahun) dan Akta Kematian. Dokumen KTP menjadi dasar dalam pemberian semua pelayanan publik; menjadi identitas penduduk; dan status domisili akhir seseorang atas peristiwa migrasi/perpindahan penduduk. Akta Kelahiran menjadi dokumen hukum asal usul seseorang dan menjadi salah satu indikator penting SDG's/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sedangkan Akta Kematian dibutuhkan dalam rangka pemutakhiran pengurang jumlah penduduk yang dinamis selain adanya penambahan penduduk dari kelahiran. Dengan meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan tersebut, maka diharapkan data penduduk yang dipengaruhi oleh dinamika penduduk (kelahiran/natalitas, kematian/mortalitas, serta migrasi/perpindahan) menjadi mutakhir dan akurat.

b. Sasaran Strategis / Jangka Menengah

Sasaran pada hakekatnya merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, dan terukur setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Indikatornya adalah hal-hal yang dapat dijadikan petunjuk tentang keberhasilan atau kegagalan pencapaian target yang telah ditentukan pada tahun yang bersangkutan.

Sasaran Perangkat Daerah yang ditetapkan merupakan sasaran pada level PD (Eselon II), yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan medium term outcome atau outcome untuk jangka menengah.

Sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tahun 2018-2023 adalah :

- 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan;**
- 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.**

Tahun 2023 merupakan tahun akhir dari target jangka menengah periode tahun 2018-2023, sehingga pada tahun 2023 menjadi tolok ukur keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan/sasaran strategis jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023.

Tabel 2.1
 Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Formulasi Indikator Tujuan	Sat	Kondisi Awal Kinerja		Target Tujuan					Kondisi Akhir
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan	Tingkat cakupan penyelenggaraan administrasi kependudukan	(Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk/KTP ditambah Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-18 Tahun ditambah Cakupan Kepemilikan Akta Kematian) dibagi 3	%	94%	95%	98%	99%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kudus Tahun 2018 - 2023

Tabel 2.2
 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran/ IKU	Formulasi Perhitungan IKU	Sat	Kondisi Awal Kinerja		Target Sasaran					Kondisi Akhir
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan	Tingkat cakupan penyelenggaraan administrasi kependudukan	1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan	Tingkat cakupan penyelenggaraan administrasi kependudukan	(Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk/KTP ditambah Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-18 Tahun ditambah Cakupan Kepemilikan Akta Kematian) dibagi 3	%	94%	95%	98%	99%	100%	100%	100%	100%
			2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	%	-	72.91	75	77	79	81	83	83

Sumber : Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kudus Tahun 2018 - 2023

Tabel 2.3
Matrik Perencanaan Kinerja Sasaran Strategis, Program, Kegiatan, Subkegiatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2023

No.	Kinerja/Kondisi yang diharapkan/Sasaran	Prgram/ Kegiatan / Subgkegiatan	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Formula	Target 2023	Ket
TUJUAN PD (PENANGGGUNG JAWAB KEPALA DINAS)						
1.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan	Urusan Administrasi Kependudukan	Tingkat cakupan penyelenggaraan administrasi kependudukan	(cakupan kepemilikan KTP + cakupan kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 tahun + cakupan kepemilikan Akta Kematian) / 3	100%	
SASARAN STRATEGIS PD (PENANGGGUNG JAWAB KEPALA DINAS)						
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan	1. Program Pendaftaran Penduduk 2. Program Pelayanan Pencatatan Sipil 3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Tingkat cakupan penyelenggaraan administrasi kependudukan ✓ IKU a. cakupan kepemilikan KTP b. cakupan kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 thn c. cakupan kepemilikan Akta Kematian	(cakupan kepemilikan KTP + cakupan kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 tahun + cakupan kepemilikan Akta Kematian) / 3 jumlah penduduk usia lebih dari 17 tahun atau telah menikah yang memiliki E-KTP dibagi jumlah penduduk usia lebih dari 17 tahun atau telah menikah dikali 100% jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang mempunyai akta kelahiran dibagi jumlah penduduk usia 0-18 tahun dikali 100% jumlah penerbitan akta kematian dibagi jumlah peristiwa kematian yang dilaporkan pada periode tertentu dikali 100%	100%	- IKK Outcome - Target Nasional - IKK Outcome - Target Nasional - IK SDG's - IKK Outcome - Target Nasional
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah ✓ IKU	LHE SAKIP dari Inspektorat	83	Tahun 2023 terdapat perubahan kebijakan penilaian SAKIP bdsr PermenPAN RB No. 88 Tahun 2021, dimana sebelumnya menggunakan PermenPAN RB No. 12 Tahun 2015
PROGRAM PD (PENANGGGUNG JAWAB PEJABAT ESELON III)						
1.	Meningkatnya kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan sesuai standar	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan kepemilikan KTP	jumlah penduduk usia lebih dari 17 tahun atau telah menikah yang memiliki E-KTP dibagi jumlah penduduk usia lebih dari 17 tahun atau telah menikah dikali 100%	100%	- IKK Outcome - Target Nasional
2.	Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil sesuai standar	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 thn	jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang mempunyai akta kelahiran dibagi jumlah penduduk usia 0-18 tahun dikali 100%	100%	- IKK Outcome - Target Nasional - IK SDG's
3.	Meningkatnya kualitas data dan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten yang akurat	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Cakupan pengelolaan database kependudukan	Jumlah data kependudukan skala kabupaten yang dimutakhirkan sesuai standar dibagi jumlah standar pemutakhiran data kependudukan dikali 100%	100%	
4.	Meningkatnya kualitas administrasi perkantoran pendukung pelayanan adminduk	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) atas penyelenggaraan pelayanan PD	92%	
KEGIATAN PD (PENANGGGUNG JAWAB PEJABAT ESELON III)						
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk sesuai standar	Keg. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk sesuai standar	Jumlah penerbitan dokumen KK + KTP + KIA + Surat Pindah-Datang pada tahun berjalan	169.000 lbr	

2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan penerbitan dokumen pencatatan sipil sesuai standar	Keg. Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil sesuai standar	Jumlah penerbitan dokumen akta kelahiran + akta kematian + akta perkawinan + akta perceraian + dokumen perubahan peristiwa penting pada tahun berjalan	33.930 lbr	
3.	Meningkatnya Instansi yang memanfaatkan data kependudukan sesuai standar	Keg. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah instansi yang memanfaatkan data kependudukan sesuai standar	Jumlah instansi yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan PKS Pemanfaatan Data Kependudukan	15 instansi	IKK Output
4.	Tersedianya pedoman dokumen perencanaan, dan pelaporan kinerja sesuai standar	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai standar	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai standar	48 dokumen	
5.	Terselenggaranya administrasi keuangan PD yang akuntabel	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi pertanggungjawaban anggaran, dan dokumen pelaporan keuangan yang tersusun sesuai standar	Jumlah dokumen administrasi pertanggungjawaban anggaran, dan dokumen pelaporan keuangan yang tersusun sesuai standar	63 dokumen	
6.	Meningkatnya peningkatan kapasitas ASN sesuai standar	Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kepegawaian sesuai standar	Jumlah dokumen kepegawaian sesuai standar	12 dokumen	
7.	Terselenggaranya layanan pendukung perkantoran sesuai standar	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	100%	
8.	Efisien dan efektifnya pengadaan BMD	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan peralatan kantor sesuai ketentuan	Jumlah pengadaan peralatan kantor sesuai ketentuan	2 unit	
9.	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai satandar	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan administrasi kependudukan	Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan administrasi kependudukan	12 laporan	
10.	Terpeliharanya Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	26 unit	
SUBKEGIATAN PD (PENANGGUNG JAWAB ESELON IV/SUBKOORDINATOR/JF AHLI MUDA)						
1.	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	1. Jumlah penerbitan dokumen pindah dan datang penduduk sesuai standar 2. Jumlah penerbitan KTP dan KIA sesuai standar 3. Jumlah penerbitan dokumen Kartu Keluarga sesuai standar 4. Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	1. Jumlah penerbitan dokumen pindah dan datang penduduk sesuai standar 2. Jumlah penerbitan KTP dan KIA sesuai standar 3. Jumlah penerbitan dokumen Kartu Keluarga sesuai standar 4. Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	9.000 dokumen 90.000 dokumen 70.000 Dokumen 12 laporan	
2.	Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan pelayanan pencatatan sipil	1. Jumlah penerbitan dokumen akta perkawinan sesuai prosedur 2. Jumlah penerbitan akta kelahiran dan kematian sesuai standar 3. Jumlah penerbitan dokumen akta perceraian sesuai prosedur 4. Jumlah penerbitan perubahan data peristiwa penting sesuai prosedur 5. Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	1. Jumlah penerbitan dokumen akta perkawinan sesuai prosedur 2. Jumlah penerbitan akta kelahiran dan kematian sesuai standar 3. Jumlah penerbitan dokumen akta perceraian sesuai prosedur 4. Jumlah penerbitan perubahan data peristiwa penting sesuai prosedur 5. Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	130 dokumen 33.000 Dokumen 30 dokumen 770 dokumen 5 Layanan	
3.	Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Jumlah penyajian dan penyusunan buku/data Kependudukan 2. Jumlah laporan fasilitasi penyediaan sarpras SIAK sesuai standar 3. Jumlah fasilitasi pengelolaan sistem dan basis data SIAK sesuai standar 4. Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Jumlah penyajian dan penyusunan buku/data Kependudukan 2. Jumlah laporan fasilitasi penyediaan sarpras SIAK sesuai standar 3. Jumlah fasilitasi pengelolaan sistem dan basis data SIAK sesuai standar 4. Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3 dokumen 12 dokumen 1 dokumen 12 laporan	

4.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, dokumen anggaran, dokumen pelaporan kegiatan/kinerja yang tersusun sesuai standar	Jumlah dokumen perencanaan, dokumen anggaran, dokumen pelaporan kegiatan/kinerja yang tersusun sesuai standar	19 dokumen	
5.	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jmh dokumen evaluasi OPD	Jmh dok evaluasi OPD (Evaluasi Renstra, Evaluasi Renja Triwulanan, Evaluasi Capaian Kinerja Triwulanan, Evaluasi Rencana Aksi Triwulanan, Lapo Capaian Output Dok Kependudukan Triwulanan, Lap Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran/TEPRA bulanan	29 dokumen	
6.	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN x jumlah bulan penerimaan	325 orang/bulan	
7.	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jmh dok adm pertanggungjawaban keuangan	Jmh dok adm pertanggungjawaban keu (Lap SPJ Fungsional SKPD Bulanan; Lap SPJ Administratif SKPD Bulanan; Lap Prognosis Semesteran; Lap Keu SKPD Th 2022; Lap Rekap Daftar Transaksi Harian(DTH) Pajak SKPD Bulanan; Lap Pajak Daerah SKPD Bulanan; Lap Buku Pajak per Jenis Pajak Bulanan	63 dokumen	
8.	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pendataan dan Pengelolaan	Jumlah Laporan Pendataan dan Pengelolaan	12 laporan	
9.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	
10.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	
11.	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	
12.	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	
13.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	
14.	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	
15.	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 dokumen	
16.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	
17.	Tersedianya mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	
18.	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2 unit	
19.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	
20.	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	12 laporan	
21.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan"	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan"	12 laporan	
22.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 unit	
23.	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1 unit	

Sumber : Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kudus Tahun 2018 - 2023

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah, serta dasar dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada Tahun 2023 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Kudus untuk mewujudkan target kinerja.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus telah menetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas dengan Bupati Kudus, Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III dengan Kepala Dinas, Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon IV dengan Sekretaris Dinas, Perjanjian Kinerja Staf Bidang (JFT, JFU dan PPPK) dengan Kepala Bidang, Perjanjian Kinerja Staf Sekretariat dengan Kepala Subbagian.

B.1 PERJANJIAN KINERJA KEPALA DINAS

Guna mewujudkan sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, sasaran subkegiatan, indikator dan target kinerja telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2023 sebagaimana Tabel 2.5 berikut, yang dirinci terbagi dalam 4 program, 10 kegiatan, dan 23 subkegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Kudus Tahun 2023 dengan anggaran total belanja sejumlah Rp.9.340.245.568,-.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran/IKU	Target
1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat cakupan penyelenggaraan administrasi kependudukan 	100%
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Nilai evaluasi Sistim Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah 	83

Program	Anggaran (Rp.)	Penanggung Jawab
1. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp.2.779.538.260,-	Kabid Pendaftaran Penduduk
2. Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Rp.782.089.028,-	Kabid Pencatatan Sipil
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Rp.815,575,750,-	Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.4.963.042.530,-	Sekretaris Dinas
TOTAL	Rp.9.340.245.568,-	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kudus

Tabel 2.5
Sasaran Strategis, IKU dirinci per Program
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan	Tingkat cakupan penyelenggaraan administrasi kependudukan	1. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2. Program Pelayanan Pencatatan Sipil 3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kudus

Rencana aksi Kepala Dinas guna mencapai sasaran strategis tersebut adalah:

1. Menyelenggarakan upaya peningkatan pelayanan administrasi kependudukan (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan) sesuai standar pelayanan prima;
2. Menyelenggarakan dan mengelola Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) sesuai standar;
3. Mengembangkan inovasi di bidang administrasi kependudukan menuju pelayanan publik yang berkualitas;
4. Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan strategis dan tahunan, pengukuran kinerja, evaluasi internal dan eksternal (penjaminan mutu) dan pelaporan kinerja.

B.2 PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS DINAS

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2023

Sasaran Kinerja Program	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kualitas administrasi perkantoran pendukung pelayanan adminduk	Indeks Kepuasan Masyarakat	92%

Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Tersedianya pedoman dokumen perencanaan, dan pelaporan kinerja sesuai standar	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai standar	48 dokumen
Terselenggaranya administrasi keuangan PD yang akuntabel	Jumlah dokumen administrasi pertanggungjawaban anggaran, dan dokumen pelaporan keuangan yang tersusun sesuai standar	63 dokumen
Meningkatnya peningkatan kapasitas ASN sesuai standar	Jumlah dokumen kepegawaian sesuai standar	12 dokumen
Terselenggaranya layanan pendukung perkantoran sesuai standar	Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	100%
Efisien dan efektifnya pengadaan BMD	Jumlah pengadaan peralatan kantor sesuai ketentuan	2 unit
Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai satandar	Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan administrasi kependudukan	12 laporan
Terpeliharanya Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	26 unit

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Penanggung Jawab
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.963.042.530,-	Sekretaris Dinas
1) Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74.260.820,-	Sekretaris Dinas
2) Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.177.140.000,-	Sekretaris Dinas
3) Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.217.000,-	Sekretaris Dinas
4) Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	170.715.960,-	Sekretaris Dinas
5) Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.376.000,-	Sekretaris Dinas
6) Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	373.656.000,-	Sekretaris Dinas
7) Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.676.750,-	Sekretaris Dinas

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kudus

Rencana aksi Sekretaris Dinas guna mencapai sasaran program dan kegiatan tersebut adalah:

1. Mengkoordinasikan dan menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Perangkat Daerah sesuai standar;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu/evaluasi dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai standar;

3. Mengkoordinasikan dan menyusun dokumen pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai standar;
4. Mengkoordinasikan dan menyusun dokumen pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah sesuai standar;
5. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum, aset dan kepegawaian sesuai standar.
6. Mengoordinasikan evaluasi pelayanan adminduk melalui pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala per triwulan.

B.3 PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2023

Sasaran Kinerja Program	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan sesuai standar	Cakupan kepemilikan KTP	100%

Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk sesuai standar	Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk sesuai standar	169.000 lbr

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Penanggung Jawab
Program Pendaftaran Penduduk	2.779.538.260,-	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Keg. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.779.538.260,-	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kudus

Rencana aksi yang akan dilakukan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk guna mencapai sasaran program dan kegiatan tersebut adalah:

1. Menyusun kebijakan teknis pelayanan pendaftaran penduduk;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk baik dengan internal dan eksternal dinas;
3. Menyelenggarakan koordinasi lintas sektoral pelayanan pendaftaran penduduk;
4. Menyelenggarakan pelayanan pendaftaran penduduk sesuai standar.

B.4 PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

Tabel 2.8
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2023

Sasaran Kinerja Program	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil sesuai standar	Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 tahun	100%

Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan penerbitan dokumen pencatatan sipil sesuai standar	Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil sesuai standar	33.930 lbr

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Penanggung Jawab
Program Pelayanan Pencatatan Sipil	782.089.028,-	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Keg. Pelayanan Pencatatan Sipil	782.089.028,-	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kudus

Rencana aksi Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil guna mencapai sasaran program dan kegiatan tersebut adalah:

1. Mengkoordinasikan kebijakan teknis untuk pelayanan pencatatan sipil;
2. Menyelenggarakan koordinasi lintas sektoral pelayanan pencatatan sipil;
3. Menyelenggarakan pelayanan pencatatan sipil sesuai standar;
4. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan pencatatan sipil.

B.5 PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (PIAK) DAN PEMANFAATAN DATA

Tabel 2.9
Perjanjian Kinerja Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2023

Sasaran Kinerja Program	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kualitas data dan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten yang akurat	Cakupan pengelolaan database kependudukan	100%

Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Instansi yang memanfaatkan data kependudukan sesuai standar	Jumlah instansi yang memanfaatkan data kependudukan sesuai standar	15 instansi

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Penanggung Jawab
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	815.575.750,-	Kepala Bidang Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data
Keg. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	815.575.750,-	Kepala Bidang Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kudus

Rencana aksi Kepala Bidang Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data guna mencapai sasaran program dan kegiatan tersebut adalah:

1. Merumuskan kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
2. Menyelenggarakan pengelolaan data kependudukan dan SIAK sesuai standar;

3. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran biaya pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
4. Merumuskan kebijakan teknis kerjasama pemanfaatan data kependudukan;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan inovasi baru pelayanan administrasi kependudukan;
6. Merumuskan kebijakan teknis kerjasama pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
7. Menyelenggarakan pelayanan data kependudukan sesuai standar;
8. Fasilitasi pelaporan pemanfaatan dan akses data kependudukan oleh lembaga pengguna per semester sesuai standar.

B.6 PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Tabel 2.10
Perjanjian Kinerja Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2023

Sasaran Kinerja Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target
1. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, dokumen anggaran, dokumen pelaporan kegiatan/kinerja yang tersusun sesuai standar	19 dokumen
2. Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jmh dok evaluasi OPD Jmh dok evaluasi PD	29 dokumen
3. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	325 orang/bulan
4. Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jmh dok adm pertanggungjawaban keuangan	63 dokumen

Subkegiatan	Anggaran (Rp.)	Penanggung Jawab
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45.672.520,-	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
2. Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	28.588.300,-	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.121.007.000,-	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	56.133.000,-	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kudus

Rencana aksi Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan guna mencapai sasaran subkegiatan tersebut adalah:

1. Menyiapkan bahan rancangan dan bahan penetapan dokumen perencanaan sesuai standar dan tepat waktu;
2. Menyiapkan bahan rancangan dan penetapan dokumen penganggaran sesuai standar dan tepat waktu;
3. Mengendalikan pelaksanaan pengukuran kinerja dan penyusunan dokumen evaluasi capaian kinerja periode bulanan dan triwulanan sesuai dengan standar dan tepat waktu;
4. Menyusun materi tindak lanjut hasil reviu/evaluasi dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai standar;
5. Mengoordinasikan bahan penyusunan reviu/evaluasi dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai ketentuan;

6. Menyiapkan bahan penyusunan laporan LKJIP Tahun 2022, LPPD Tahun 2022, LKPJ ATA 2022 Perangkat Daerah sesuai dengan standar;
7. Mengoordinasikan penyusunan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Perangkat Daerah secara periodik bulanan, semesteran dan tahunan.

B.7 PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tabel 2.11
Pengukuran Perjanjian Kinerja Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2023

Sasaran Kinerja Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target
1. Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pendataan dan Pengelolaan	12 laporan
2. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket
3. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket
4. Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket
5. Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket
6. Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket
7. Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen
8. Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 dokumen
9. Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
10. Tersedianya mebel	Jumlah mebel yang disediakan	2 unit
11. Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit
12. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
13. Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	12 laporan
14. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 laporan
15. Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 unit
16. Tersedianya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1 unit

Subkegiatan	Anggaran (Rp.)	Penanggung Jawab
1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.217.000,-	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2.284.000,-	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

3.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.320.200,-	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
4.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.531.000,-	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
5.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.177.000,-	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.700.400,-	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
7.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.600.000,-	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
8.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.155.360,-	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82.948.000,-	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
10.	Pengadaan Mebel	11.076.000,-	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
11.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.300.000,-	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
12.	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	3.276.000,-	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
13.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.910.000,-	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
14.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	358.470.000,-	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
15.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	113.507.750,-	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
16.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.169.000,-	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kudus

Rencana aksi Kepala Subbagian Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian guna mencapai sasaran subkegiatan tersebut adalah:

1. Mengkoordinasikan pelayanan administrasi kepegawaian;
2. Mengkoordinasikan pelayanan administrasi umum;
3. Mengkoordinasikan pelayanan administrasi pengadaan BMD;
4. Mengkoordinasikan pelayanan pemeliharaan BMD;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan implementasi zona integritas, reformasi birokrasi, evaluasi pelayanan publik PD.

B.8 PERJANJIAN KINERJA SUBKOORDINATOR PINDAH DATANG DAN PENDATAAN PENDUDUK

Tabel 2.12
Perjanjian Kinerja Subkoordinator Pindah Datang Dan Pendataan Penduduk
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2023

Sasaran Kinerja Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1. Jumlah penerbitan dokumen pindah dan datang penduduk sesuai standar	9.000 dokumen
	2. Jumlah penerbitan KTP dan KIA sesuai standar	90.000 dokumen
	3. Jumlah penerbitan dokumen Kartu Keluarga sesuai standar	70.000 dokumen
	4. Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	12 laporan

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kudus

Rencana aksi Subkoordinator Pindah Datang Dan Pendataan Penduduk guna mencapai sasaran subkegiatan tersebut adalah:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pendaftaran penduduk;
2. Menyusun laporan Hasil Evaluasi Pelayanan Penerbitan Dokumen Pendaftaran penduduk;
3. Melaksanakan pelayanan penerbitan dokumen KTP sesuai standar;
4. Melaksanakan pelayanan penerbitan dokumen KIA sesuai standar;
5. Melaksanakan pelayanan penerbitan dokumen Kartu Keluarga sesuai standar;
6. Melaksanakan pelayanan penerbitan dokumen pindah/datang penduduk sesuai standar;
7. Mengkoordinasikan fasilitasi pelayanan, sosialisasi kebijakan, serta konsultasi dan koordinasi peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk.

B.9 PERJANJIAN KINERJA SUBKOORDINATOR KELAHIRAN DAN KEMATIAN

Tabel 2.13
Pengukuran Perjanjian Kinerja Subkoordinator Kelahiran dan Kematian
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2023

Sasaran Kinerja Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil (Kelahiran dan Kematian)	1. Jumlah penerbitan akta kelahiran sesuai standar	18.500 dok
	2. Jumlah penerbitan akta kematian sesuai standar	8.900 dok

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kudus

Rencana aksi Subkoordinator Kelahiran Dan Kematian guna mencapai sasaran subkegiatan tersebut adalah:

1. Melaksanakan pelayanan penerbitan akta kelahiran sesuai standar
2. Melaksanakan pelayanan penerbitan akta kematian sesuai standar

B.10 PERJANJIAN KINERJA SUBKOORDINATOR PERKAWINAN, PERCERAIAN, PERUBAHAN STATUS ANAK DAN PEWARGANEGARAAN

Tabel 2.14
Pengukuran Perjanjian Kinerja Subkoordinator Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak Dan Pewarganegaraan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2023

Sasaran Kinerja Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil (Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak Dan Pewarganegaraan)	1. Jumlah penerbitan akta perkawinan sesuai standar	100 dok
	2. Jumlah penerbitan akta perceraian sesuai sandar	10 dok
	3. Jumlah penerbitan akta pengesahan anak dan pengakuan anak sesuai standar	3 dok
	4. Jumlah pelayanan perubahan status anak	50 dok
	5. Jumlah pelayanan penerbitan catatan pinggir akta pencatatan sipil sesuai standar	2800 dok

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kudus

Rencana Aksi Subkoordinator Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak Dan Pewarganegaraan guna mencapai sasaran subkegiatan tersebut adalah:

1. Melaksanakan pelayanan penerbitan akta perkawinan bagi penduduk non muslim;
2. Melaksanakan pelayanan penerbitan akta perceraian bagi penduduk non muslim;
3. Melaksanakan pelayanan penerbitan dokumen perubahan status anak sesuai standar;
4. Melaksanakan pelayanan penerbitan dokumen catatan pinggir;
5. Melaksanakan pelayanan pemutahiran data penduduk kawin;
6. Melaksanakan pelayanan pemutahiran data penduduk cerai.

B.11 PERJANJIAN KINERJA SUBKOORDINATOR PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Tabel 2.15
Pengukuran Perjanjian Kinerja Subkoordinator Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2023

Sasaran Kinerja Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya pengelolaan informasi administrasi kependudukan sesuai standar	1. Jumlah fasilitasi sarpras SIAK yang dapat beroperasi sesuai standar	12 laporan
	2. Jumlah laporan pengelolaan TIK SIAK yang dapat beroperasi sesuai standar	12 laporan
	3. Jumlah penyajian data kependudukan	3 dokumen
	4. Jumlah laporan pengelolaan sistem dan basis data SIAK sesuai standar	4 laporan

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kudus

Rencana Aksi Subkoordinator Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan guna mencapai sasaran subkegiatan adalah:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sesuai standar

2. Penyusunan Buku Profil Kependudukan dan Buku Agregat Kependudukan semesteran sesuai standar
3. Pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan pengelolaan data kependudukan dan SIAK
4. Menyediakan analisis informasi perumusan masalah kebijakan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan guna penyusunan program dan kegiatan PIAK.

B.12 PERJANJIAN KINERJA SUBKOORDINATOR KERJA SAMA DAN INOVASI PELAYANAN

Tabel 2.16
Pengukuran Perjanjian Kinerja Subkoordinator Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2023

Sasaran Kinerja Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan data kependudukan sesuai standar	1. Jumlah penyajian data agregat kependudukan lintas sektoral sesuai standar	12 laporan
	2. Jumlah Perjanjian Kerja Sama baru terkait pemanfaatan data kependudukan sesuai standar	4 dokumen
	3. Jumlah laporan hak akses data kependudukan	15 laporan/PD
	4. Jumlah proposal inovasi pelayanan administrasi kependudukan	2 inovasi/proposal

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kudus

Rencana Aksi Subkoordinator Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan guna mencapai sasaran subkegiatan adalah:

1. Menyelenggarakan penyajian data Kependudukan (DKB, data agregat Kependudukan) yang bersumber basis data SIAK;
2. Menyelenggarakan pemanfaatan hak akses data kependudukan;
3. Menyelenggarakan pemanfaatan implementasi inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
4. Menyelenggarakan kerjasama (PKS) pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka akuntabilitas kinerja. telah dilakukan pengukuran kinerja organisasi dan individu tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan di tahun 2023, baik pencapaian sasaran strategis (IKU), sasaran program, sasaran kegiatan, sasaran subkegiatan serta pencapaian rencana aksi yang telah disusun melalui Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berbasis webbased melalui laman <https://e-planning.kuduskab.go.id/sakip>.

Guna proses pengukuran kinerja, maka terlebih dahulu telah dilakukan pengumpulan data kinerja, baik yang bersumber dari internal dan eksternal. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data kinerja dapat melalui rapat koordinasi, wawancara, observasi dan studi dokumentasi dari berbagai literasi terkait. Data kinerja yang dikumpulkan dari berbagai sumber diverifikasi berjenjang, tabulasi, penyajian dan analisis data.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah. maka digunakan skala penilaian capaian kinerja dengan pijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya dikategorikan ke dalam 5 (lima) skala kategori sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	90,1 lebih	Sangat Tinggi
2.	75,1 s/d 90	Tinggi
3.	65,1 s/d 75	Sedang
4.	50,1 s/d 65	Rendah
5.	0 s/d 50	Sangat Rendah

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Capaian kinerja organisasi, khususnya capaian sasaran strategis organisasi tercermin melalui capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus. IKU tersebut merupakan indikator kinerja Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Bupati Kudus.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2023

N o.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja sebelumnya				Capaian Kinerja Tahun 2023			Target Akhir Renstra (2023)	% Capaian kinerja 2023 terhadap target Renstra 2023	Target Nasional RPJMN 2023	% Capaian 2023 terhadap target Nasional
			2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian kinerja				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	$10 = \frac{(9/8)}{100}$	11	$12 = \frac{(9/11)}{100} * 100$	13	14
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan	Tingkat cakupan penyelenggaraan administrasi kependudukan	97.31 %	99.25 %	98.89 %	99.15 %	100%	99.87 %	99.87 %	100%	99.87 %	-	-
		▪ Cakupan Kepemilikan KTP	99.74 %	99.18 %	98.54 %	98.97 %	100%	99.66 %	99.66 %	100%	99.66 %	99.40 %	100.26 %
		▪ Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun	92.18 %	97.55 %	98.01 %	98.49 %	100%	99.96 %	99.96 %	100%	99.96 %	98%	102%
		▪ Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	125%
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi SAKIP OPD	75.04	80.38	89.64	94.35	83	73.35	88.37 %	83	88.37 %	70	104.78 %
Rata-rata % capaian kinerja									94.12 %		94.12 %		

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kudus

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2023 adalah 94.12% (sangat tinggi). Penjelasan atas capaian kinerja masing-masing indikator IKU/Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a) Indikator IKU Tingkat Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Capaian kinerja IKU Tingkat Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun 2023 sebesar 99.87% belum mencapai target tahun 2023 yang telah ditetapkan sebesar 100%.

Tingkat cakupan penyelenggaraan administrasi kependudukan diperoleh dari perhitungan formula yaitu Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk/KTP ditambah Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-18 Tahun ditambah Cakupan Kepemilikan Akta Kematian) dibagi 3.

$$\begin{aligned} \text{Tingkat cakupan penyelenggaraan administrasi kependudukan} &= \frac{(99.66\% + 99.96\% + 100\%)}{3} \\ &= 99.87\% \end{aligned}$$

Angka capaian kinerja IKU Tingkat Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun 2023 mengalami trend positif cenderung meningkat daripada capaian kinerja tahun sebelumnya mulai tahun 2018 s.d 2022. yaitu mulai dari 95%. 97.31%. 99.25%. 98.89% dan 99.15% terakhir pada tahun 2023 meningkat menjadi 99.87%. Hal ini menandakan adanya upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan administrasi kependudukan dari tahun ke tahun.

Dari kekurangan dan kelemahan yang ada telah diperbaiki menjadi peningkatan kinerja secara bertahap setiap tahun.

Angka capaian kinerja IKU Tingkat Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun 2023 sebesar 99.87% hampir mencapai target akhir Renstra Tahun 2023 sebesar 100%. Prosentase capaian kinerja tahun 2023 sebesar 99.87% meningkat jika dibandingkan dengan prosentase capaian kinerja tahun 2022 sebesar 99.15%.

Standar nasional atas target Tingkat Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun 2023 tidak ada. Adapun standar nasional kinerja terkait administrasi kependudukan pada tahun 2023 berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 adalah Cakupan Kepemilikan KTP sebesar 99.40%, Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 tahun sebesar 98% dan Cakupan Kepemilikan Akta Kematian sebesar 80%.

Belum tercapainya target IKU Tingkat Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada tahun 2023 disebabkan karena :

1. Belum tercapainya target cakupan kepemilikan KTP karena masih terdapat penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP.

Jumlah penduduk Wajib KTP (WKTP) Tahun 2023 di Kabupaten Kudus sejumlah 643.060 orang, dimana sejumlah 640.878 orang (99.66%) telah melakukan perekaman dan memiliki KTP, sedangkan sisanya sejumlah 2.182 orang (0.34%) belum memiliki KTP yang disebabkan karena penduduk tersebut belum melakukan perekaman KTP (penduduk usia pemula, penduduk yang berada di luar kota, luar negeri (bekerja) dan tidak diketahui keberadaannya).

Upaya yang telah dilakukan saat ini :

- Penyelesaian target perekaman KTP usia pemula melalui perekaman massal jemput bola di SMA/SMK/MA se-Kabupaten Kudus yang telah dikoordinasikan pelaksanaannya melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- Perekaman massal jemput bola di Desa/Kelurahan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Pemanggilan Perekaman KTP Belum Rekam kepada Wajib KTP yang belum rekam berdasarkan data dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri;
- Pelayanan jemput bola perekaman KTP penduduk rentan seperti korban bencana banjir, orang terlantar (panti asuhan, panti sosial, panti tuna netra), ODGJ, penghuni lapas, disabilitas, dan sakit keras;
- Pelayanan terintegrasi penerbitan dokumen administrasi kependudukan atas peristiwa kedatangan penduduk dari luar kota dengan Paket 3in1 yaitu Kartu Keluarga. KTP. dan Kartu Identitas Anak (apabila dengan anak).

Alternatif solusi di periode mendatang:

- Peningkatan capaian kepemilikan KTP melalui optimalisasi pelayanan jemput bola di desa/kelurahan. SMA/SMK/MA; dan pelayanan extra time (Sabtu/Minggu/Hari Libur Nasional) perekaman KTP di dinas dan kecamatan.
2. Belum tercapainya target cakupan kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-18 tahun karena masih terdapat beberapa penduduk yang belum melaporkan peristiwa kelahiran.

Tahun 2023, Penduduk usia 0–18 tahun berjumlah 242.831 orang, dimana sejumlah 242.738 orang (99.96%) telah memiliki akta kelahiran dan 93 orang (0.04%) belum memiliki akta kelahiran karena belum melakukan pengurusan akta kelahiran yang didominasi oleh usia 6-18 tahun. Penduduk belum melakukan pengurusan Akta Kelahiran karena belum memahami arti pentingnya dokumen akta kelahiran.

Upaya yang telah dilakukan saat ini :

- Pelayanan terintegrasi penerbitan dokumen administrasi kependudukan atas peristiwa kelahiran dengan Paket 3in1 yaitu Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak, yang dilakukan di semua titik pelayanan baik melalui pelayanan tatap muka maupun daring;
- Kerjasama pelayanan pencatatan kelahiran bayi baru lahir Paket 3in1 dengan Rumah Sakit Daerah dan Swasta, yang kemudian dokumen jadi diantar ke Rumah Sakit Daerah dan Swasta tersebut sebelum ibu dan bayi pulang ke rumah;
- Pelayanan Paket 3in1 di seluruh Desa/Kelurahan oleh Petugas Registrasi Desa/Kelurahan, dimana dokumen Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dapat langsung dicetak dan diterima warga, sedangkan dokumen KIA akan diantar melalui Petugas Delivery Order ke Desa/rumah warga;
- Pelayanan Paket 3in1 di seluruh kecamatan melalui inovasi Layanan PADUKA, dimana dokumen Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KIA dapat langsung dicetak dan diterima pemohon saat itu juga;
- Pelayanan Paket 3in1 melalui relawan petugas stakeholder desa (Karang Taruna, PKK, Bidan Desa) yang tergabung dalam Program RUMAH PAMAN CAPIL (Rumah Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil), swadaya mandiri yang tidak memperoleh honor dan merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat desa khusus dalam pengajuan dokumen kependudukan.

Alternatif solusi di periode mendatang:

- Sosialisasi kebijakan adminduk. agar masyarakat melakukan pemutakhiran data kependudukan;
- Optimalisasi pelayanan tatap muka di desa/kelurahan. kecamatan dan dinas. serta pelayanan daring dengan Standar Pelayanan 1x24 jam;
- Pelayanan terintegrasi pencatatan peristiwa kelahiran 3in1 (KK. Akta Kelahiran. KIA).

Guna pencapaian sasaran strategis (IKU) Tingkat cakupan penyelenggaraan administrasi kependudukan pada tahun 2023, sumber daya anggaran yang digunakan sejumlah Rp.4.377.203.038,- dan terealisasi sejumlah Rp.4.226.035.868,- sehingga mempunyai SILPA sejumlah Rp.151.167.170,-. Target IKU Tingkat cakupan penyelenggaraan administrasi kependudukan pada tahun 2023 sejumlah 100%, terealisasi sejumlah 99.87%, sehingga terdapat efisiensi sejumlah 3.33%. Anggaran sejumlah Rp.4.377.203.038,- terdiri dari 3 program yaitu Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Program Pelayanan Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data. Efisiensi penggunaan sumber daya sejumlah 3.33% tersebut dilakukan melalui optimalisasi penghematan penggunaan barang habis pakai pelayanan sehingga tidak boros menggunakan anggaran, efisiensi kontrak pengadaan barang jasa penyediaan barang operasional, dan optimalisasi

penggunaan sarpras pelayanan dengan baik yang dapat meminimalisir kerusakan sarpras, serta sisa kontrak pengadaan barang.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis (IKU) Tingkat cakupan penyelenggaraan administrasi kependudukan pada tahun 2023 yaitu Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk; Program Pelayanan Pencatatan Sipil; dan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis (IKU) Tingkat cakupan penyelenggaraan administrasi kependudukan pada tahun 2023 yaitu Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk; Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil; dan Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Melalui 3 program tersebut telah dilakukan crosscutting internal/antar bidang melalui kolaborasi internal pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan terintegrasi, serta crosscutting eksternal/kolaborasi dengan eksternal para pemangku kepentingan terkait seperti:

1. Optimalisasi Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran melalui:
 - a. Pelayanan terintegrasi penerbitan dokumen administrasi kependudukan atas peristiwa kelahiran dengan Paket 3in1 yaitu Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak yang dilakukan di semua titik pelayanan baik melalui pelayanan tatap muka maupun daring;
 - b. Kerjasama pelayanan pencatatan kelahiran bayi baru lahir Paket 3in1 dengan Rumah Sakit Daerah dan Swasta, yang kemudian dokumen jadi diantar ke Rumah Sakit Daerah dan Swasta tersebut sebelum ibu dan bayi pulang ke rumah. Inovasi ini terkenal dengan nama Sibulan Mahir (Si Buah Hati Lahir. Pulang Membawa Akta Kelahiran);
 - c. Pelayanan Paket 3in1 di seluruh Desa/Kelurahan oleh Petugas Registrasi Desa/Kelurahan, dimana dokumen Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dapat langsung dicetak dan diterima warga, sedangkan dokumen KIA akan diantar melalui Petugas Delivery Order ke Desa/rumah warga;
 - d. Pelayanan Paket 3in1 di seluruh kecamatan melalui inovasi Layanan PADUKA. dimana dokumen Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KIA dapat langsung dicetak dan diterima pemohon saat itu juga;
 - e. Pelayanan Paket 3in1 melalui relawan petugas stakeholder desa (Karang Taruna, PKK, Bidan Desa) yang tergabung dalam Program RUMAH PAMAN CAPIL (Rumah Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil), swadaya mandiri yang tidak memperoleh honor dan merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat desa khusus dalam pengajuan dokumen kependudukan;
2. Optimalisasi Peningkatan Kepemilikan Akta Kematian. dilakukan melalui:
 - a. Pengiriman Laporan Peristiwa Kematian per Desa/Kelurahan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 2 dibulan berikutnya oleh Petugas Register Desa/Kelurahan untuk kemudian diterbitkan Akta Kematian, dan update data kematian penduduk. Pelaporan peristiwa kematian dari tingkat desa/kelurahan, akan diteruskan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri;
 - b. Koordinasi berkala bulanan dengan Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus. terkait verifikasi dan validasi data kematian penerima bantuan sosial biaya pemakaman penduduk miskin, yang kemudian dilakukan

- update data kematian penduduk, serta penerbitan dokumen Kartu Keluarga, KTP, dan Akta Kematian. Capaian verifikasi dan validasi data kematian selama tahun 2023 adalah 1.707 orang. Adapapun penerbitan dokumen administrasi kependudukan yang telah diterbitkan pada tahun 2023 meliputi Akta Kematian sejumlah 756 dokumen, Kartu Keluarga sejumlah 507 dokumen, dan KTP sejumlah 507 dokumen;
- c. Penerapan Buku Pokok Pemakaman oleh 132 Petugas Register Desa/Kelurahan;
 - d. Pelayanan terintegrasi penerbitan dokumen administrasi kependudukan atas peristiwa kematian dengan Paket 3in1 yaitu Kartu Keluarga, KTP dan Akta Kematian.
3. Optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan di 9 kecamatan, melalui:
- a. Inovasi PADUKA (Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan) di 9 Kecamatan dan Mall Pelayanan Publik dimana sebelumnya hanya melayani penerbitan KTP kemudian ditambah dengan melayani penerbitan 7 (tujuh) dokumen kependudukan yang meliputi Biodata WNI, Surat Pindah/Datang, KTP, KIA, Kartu Keluarga, Akta Kematian dan Akta Kelahiran;
 - b. Personil petugas pelayanan. sarpras dan jaringan pelayanan administrasi kependudukan di 9 kecamatan berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus.
4. Optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan di 132 desa/kelurahan, dilakukan melalui:
- a) Telah ditetapkan Keputusan Bupati Kudus Nomor 420/02/2023 tentang Pengangkatan Petugas Registrasi Di Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Kudus Tahun 2023. Petugas Registrasi Desa/Kelurahan membantu dalam upaya penertiban administrasi kependudukan dan memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat di desa/kelurahan;
 - b) Inovasi KIOS PAKDE (Kios Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa) di 132 Desa/Kelurahan dengan melayani penerbitan 7 (tujuh) dokumen kependudukan meliputi Biodata WNI, Surat Pindah/Datang, KTP, KIA, Kartu Keluarga, Akta Kematian dan Akta Kelahiran;
 - c) Melalui Inovasi KIOS PAKDE telah berhasil membantu upaya pencapaian target nasional administrasi kependudukan di Kabupaten Kudus di tahun 2023 seperti kepemilikan KTP, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Kartu Identitas Anak;
 - d) Pemerintah Desa berkolaborasi mendukung pelayanan administrasi kependudukan di desa dengan menyediakan mandiri sarpras pelayanan seperti printer, komputer, jaringan internet, dan pakai habis pelayanan pendukung penerbitan dokumen administrasi kependudukan.
5. Optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan secara daring/online, dilakukan melalui pengembangan Aplikasi PAK SEMMOK (Pelayanan Administrasi Kependudukan Sepenuh Hati Melayani Masyarakat Secara Online di Kudus), dimana telah lolos uji ITSA (IT Security Assessment) oleh Direktorat PIAK Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan BSSN. Pelayanan PAK SEMMOK melayani penerbitan 7 dokumen administrasi kependudukan (Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Kedatangan Antar Kabupaten/Kota, Kartu Identitas Anak, KTP, dan

Perpindahan Keluar Kabupaten/Kota), Update Data/Sinkronisasi Data Lintas Sektoral, Layanan Konsultasi, dan Layanan Pengaduan;

6. Peningkatan mutu kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Kudus sesuai Standarisasi Pelayanan Prima, yang diwujudkan melalui:
 - a. Penghapusan denda keterlambatan pengurusan dokumen kependudukan (melalui Perda Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2020), sehingga menambah animo masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan dan/ melaporkan peristiwa kependudukan;
 - b. Penambahan titik pelayanan (6 loket dinas, 9 loket kecamatan, 1 loket MPP, 2 tim jemput bola, dan 132 loket desa/kelurahan) dan jam layanan extra time (Jumat diatas jam kerja, Sabtu, dan Minggu);
 - c. Membuka akses Layanan Informasi Adminduk melalui Petugas HelpDesk dan Petugas Pengaduan melalui tatap muka, e-mail, telepon, WhatsApp, Aplikasi PAK SEMMOK;
 - d. Pemberian Pelayanan Inklusif Prioritas Adminduk kepada pemohon di semua loket pelayanan untuk Lansia 60 tahun ke atas, penyandang disabilitas, ibu hamil, ibu menyusui ASI, dan ibu membawa balita;
 - e. Standarisasi mutu pelayanan publik melalui penetapan Maklumat Pelayanan, Standar Pelayanan Penerbitan 1x24 jam, Survei Kepuasan Masyarakat Triwulanan, Sertifikasi Manajemen Mutu Administrasi Kependudukan ISO 9001:2015 oleh Badan Akreditasi Internasional UKAS;
 - f. Digitalisasi produk dokumen pelayanan, pemanfaatan sistim informasi dalam pelayanan administrasi kependudukan melalui SIAK Terpusat, Aplikasi PAK SEMMOK (tersertifikasi ITSA BSSN), serta penerbitan dokumen terintegrasi paket 2in1 s.d 7in1;
 - g. Semua pelayanan tidak dipungut biaya (GRATIS). pelayanan tatap muka dapat ditunggu langsung jadi, dan pelayanan online dapat dicetak mandiri dan fasilitas Delivery Order (pengantaran dokumen jadi) diantar ke rumah pemohon;
 - h. Diperolehnya penghargaan dari Ombudsman RI atas Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 dengan predikat Kualitas Tertinggi/Zona Hijau dengan Nilai 97,37.



b) Indikator IKU Nilai Evaluasi SAKIP PD

Indikator nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah merupakan nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP perangkat daerah yang berasal dari akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal. Karena dipandang begitu pentingnya SAKIP perangkat daerah, maka nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah.

Hasil evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya (2022 ke bawah). Hal tersebut disebabkan karena evaluasi AKIP Tahun 2022 dilakukan dengan mengacu Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana menggunakan 5 kriteria yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Sedangkan evaluasi SAKIP Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 66 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kudus. Hasil evaluasi penilaian dituangkan dalam bentuk nilai skala mulai dari 0 s/d 100 yang meliputi 4 kriteria yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Dalam penilaian terdapat kriteria atas 3 subunsur yang dirujuk, yaitu keberadaan, kualitas dan pemanfaatan.

Angka capaian kinerja IKU Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah tahun 2023 sebesar 73.35 belum mencapai target tahun 2023 yang telah ditetapkan sebesar 83. Hal ini menandakan bahwa target yang ditetapkan tahun 2023 belum tercapai, sehingga masih perlu tindak lanjut lagi ke depan untuk meningkatkan perbaikan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perangkat daerah sebagaimana yang telah direkomendasikan Tim Review SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus dalam LHE SAKIP.

Angka capaian kinerja IKU Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah tahun 2018 s.d 2022 mengalami kenaikan yaitu mulai dari 72.91; 75.04; 80.38; 89.64; 95.35. Hasil evaluasi SAKIP Tahun 2022 sebesar 94.35 telah mencapai target akhir Renstra Dukcapil yaitu 83. Akan tetapi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2023 sejumlah 73.35 menunjukkan belum mencapai target akhir Renstra yang telah ditetapkan yang disebabkan karena adanya perubahan pedoman evaluasi SAKIP Tahun 2023 jika dibandingkan tahun sebelumnya, dimana saat ini mempedomani Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP. Walaupun belum mencapai target, akan tetapi nilai SAKIP Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan nilai tertinggi SAKIP OPD di Kabupaten Kudus TA. 2023. Hal ini menandakan bahwa telah dilakukan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dari tahun ke tahun. Dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti kekurangan dan kelemahan yang ada telah menjadi peningkatan kinerja.

Angka capaian kinerja IKU Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah tahun 2023 sebesar 73.35 tidak mencapai target Renstra Tahun 2023 sebesar 83. Prosentase capaian kinerja Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah tahun 2023 sebesar 88.37%. Kriteria nilai evaluasi SAKIP dalam target Renstra Tahun 2018-2023 di tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 menggunakan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015, sedangkan kriteria nilai evaluasi SAKIP Tahun 2023 menggunakan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 66 Tahun 2021 dimana menggunakan kriteria keberadaan, kualitas dan pemanfaatan. Kriteria keberadaan akan optimal jika kualitas keberadaan data telah terpenuhi sesuai kriteria nasional dan dipertahankan setidaknya 5 tahun terakhir. Kriteria kualitas akan optimal jika seluruh kriteria terpenuhi sesuai mandat nasional, ada upaya inovatif dan layak menjadi percontohan nasional. Kriteria pemanfaatan akan optimal jika seluruh kriteria terpenuhi sesuai mandat nasional, ada upaya inovatif dan layak menjadi percontohan nasional. Berdasarkan pada kriteria tersebut, maka nilai SAKIP 2022 dan 2023 tidak diperbandingkan.

Standar nasional atas target Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah tahun 2023 tidak ada. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, bahwa target Nilai SAKIP Tahun 2024 pada Pemerintah Daerah adalah minimal B/Baik (61 s.d 70). Capaian Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2023 sejumlah 73.35 (BB/Sangat Baik) telah mencapai standar minimal yang yang dipersyaratkan oleh Kementerian PAN dan RB pada tahun 2024.

Belum tercapainya target IKU Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah tahun 2023 disebabkan karena :

- 1) Dokumen Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai;
- 2) Pohon kinerja antar bidang dan lintas perangkat daerah (crosscutting) telah disusun, namun belum secara utuh menggambarkan lintas bidang dan lintas perangkat daerah;
- 3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus belum mempunyai pedoman teknis sebagai acuan dalam melakukan pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja;
- 4) Pemberian reward and punishment telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kudus Nomor Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, dengan produktivitas kerja dan disiplin kerja termasuk unsur dalam penilaian dan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Dalam pengukuran dan evaluasi kinerja individu telah menggunakan aplikasi ekinerja, namun pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan karena pengukuran kinerja berdasarkan aktivitas kerja masing-masing individu, sehingga belum sepenuhnya dapat dipastikan keselarasan antara kinerja Perangkat Daerah dengan aktivitas individu.

- 5) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan perubahan anggaran untuk mencapai kinerja;
- 6) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja;
- 7) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal Tahun 2022 belum dilakukan oleh SDM yang memadai;
- 8) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal Tahun 2022 belum memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi).

Guna pencapaian sasaran strategis (IKU) Nilai Evaluasi SAKIP PD di tahun 2023. sumber daya anggaran yang digunakan sejumlah Rp.4.963.042.530,- dan terealisasi sejumlah Rp.4.634.050.452,- sehingga mempunyai SILPA sejumlah Rp.328.992.078.-. Target IKU Nilai Evaluasi SAKIP PD di tahun 2023 sejumlah 83, terealisasi sejumlah 73.35, dan tidak ada efisiensi. Anggaran sejumlah Rp.4.634.050.452.- merupakan anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 7 kegiatan, dan 20 subkegiatan.

Walaupun realisasi Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2023 sejumlah 73.35 belum dapat mencapai target tahun 2023 sejumlah 83, akan tetapi capaian realisasi tersebut merupakan peringkat pertama/tertinggi Nilai SAKIP PD di Kabupaten Kudus Tahun 2023. Realisasi nilai tersebut telah melampaui standar minimal nasional Nilai SAKIP Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB Tahun 2024 dengan nilai Baik/B (61 s.d 70). Realisasi Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2023 sejumlah 73.35 telah membantu mendorong peningkatan Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2023 menjadi 72.05 (BB) dari Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2022 sejumlah 71.13 (BB).

Kebijakan dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja peningkatan Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2023 adalah:

- 1) Penyusunan dokumen perencanaan kinerja yang baik, seperti Renja Tahun 2024, Perubahan Renja Tahun 2023, Renstra Tahun 2024-2026, Perjanjian Kinerja s.d level staf baik ASN dan NonASN, SKP dan Rencana Aksi Tahun 2023, RTP Strategis dan RTP Operasional Tahun 2023, KAK Subkegiatan, GBS Subkegiatan, dan GAP Subkegiatan, Croscutting dan Cascading Kinerja;
- 2) Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan SAKIP pada tahun 2023 sejumlah 4 (empat) kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus yaitu Pembentukan Struktur Pengelola SAKIP; Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Internal AKIP; Penetapan Tim Evaluasi Internal AKIP; Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja;
- 3) Implementasi Perilaku Budaya Kerja dan Kode Etik Pelaksana Layanan, Disiplin Pegawai, Sistem Kehadiran Elektronik baik ASN dan NonASN, dan Pemberian Reward and Punishment;
- 4) Optimalisasi pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas capaian SKP dan Rencana Aksi s.d level staf, baik dilakukan harian dan bulanan secara manual laporan dan aplikasi (TI). Pengukuran dilakukan dalam

bentuk pelaporan kinerja individu, rapat koordinasi internal dan eksternal (TEPRA, Penjaminan Mutu LHE SAKIP, dll), pengawasan atasan, dan publikasi hasil kinerja;

- 5) Peningkatan kapasitas pengelola SAKIP, baik melalui Bimtek, Sosialisasi, Banchmarking, Diklat dll.
- 6) Optimalisasi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi LKJIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2022 yang dilaksanakan pada tahun 2023;
- 7) Optimalisasi pelaksanaan tindak lanjut LHE SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten Kudus. kemudian dimonitor pencapaiannya untuk dilaporkan kepada Inspektorat Kabupaten Kudus.

2. SEKRETARIS DINAS

a) Indikator Kinerja Program: Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 3.2
Capaian Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2023

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja sebelumnya				Capaian Kinerja Tahun 2023			Target Akhir Renstra (2023)	% Capaian 2023 terhadap Target Akhir 2023	Target Nasional 2023	% Capaian 2023 terhadap Target Nasional
			2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian kinerja				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(9/8)	11	12=(9/11)	13	14
INDIKATOR KINERJA PROGRAM													
1	Meningkatnya kualitas administrasi perkantoran pendukung pelayanan adminduk	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88.59%	88.61%	95.71%	91.24%	92%	99.79%	108.47%	92%	108.47%	-	-
Rata-rata % capaian kinerja program									108.47%				
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN													
1	Tersedianya pedoman dokumen perencanaan, dan pelaporan kinerja sesuai standar	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai standar	NA	NA	48 dokumen	48 dokumen	48 dokumen	48 dokumen	100%	48 dokumen	100%	-	-
2	Terselenggaranya administrasi keuangan PD yang akuntabel	Jumlah dokumen administrasi pertanggungjawaban anggaran, dan dokumen pelaporan keuangan yang tersusun sesuai standar	NA	NA	63 dokumen	63 dokumen	63 dokumen	63 dokumen	100%	63 dokumen	100%	-	-
3	Meningkatnya peningkatan kapasitas ASN sesuai standar	Jumlah dokumen kepegawaian sesuai standar	NA	NA	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	100%	-	-
4	Terselenggaranya layanan pendukung perkantoran sesuai standar	Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
5	Efisien dan efektifnya pengadaan BMD	Jumlah pengadaan peralatan kantor sesuai ketentuan	NA	NA	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	100%	-	-
6	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai satandar	Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan administrasi kependudukan	NA	NA	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	100%	-	-
7	Terpeliharanya Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	NA	NA	26 unit	26 unit	26 unit	26 unit	100%	26 unit	100%	-	-
Rata-rata % capaian kinerja kegiatan									100.00%				

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kudus

Capaian realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023 sejumlah 99.79% telah melebihi target tahun 2023 sejumlah 92%. Capaian Nilai IKM mengalami trend positif meningkat mulai tahun 2019 s.d 2023, dan capaian tahun 2023 lebih tinggi daripada tahun 2022. Capaian Nilai IKM Tahun 2023 telah mencapai dan melampaui target akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023.

Standar nasional nilai IKM tidak ada, akan tetapi perbaikan dan peningkatan nilai IKM menjadi salah satu komponen penting dalam Penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN dan RB. Nilai IKM menjadi salah

satu komponen dari perumusan perhitungan Indeks Pelayanan Publik yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tahun 2023 tidak menjadi lokus utama PEKPPP di Kabupaten Kudus Tahun 2023, akan tetapi tetap menyampaikan hasil monitoring dan perbaikan kualitas pelayanan publik sebagaimana standar PEKPPP tersebut. Nilai IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus meningkat yaitu 4.22 (Sangat Baik) di tahun 2021 dan 4.39 (Sangat Baik) di tahun 2022.

Faktor-faktor penyebab keberhasilan peningkatan Nilai IKM Tahun 2023 adalah dilakukannya standarisasi kebijakan pelayanan, peningkatan profesionalisme SDM, peningkatan sarpras pelayanan, optimalisasi sarana pengaduan, digitalisasi layanan, dan optimalisasi inovasi layanan.

Guna pencapaian sasaran kinerja program berupa Nilai IKM tahun 2023, sumber daya anggaran yang digunakan sejumlah Rp.4.963.042.530,- dan terealisasi sejumlah Rp.4.634.050.452,- sehingga mempunyai SILPA sejumlah Rp.328.992.078,-. Target indikator Nilai IKM tahun 2023 sejumlah 92%, terealisasi sejumlah 99,79%, sehingga terdapat efisiensi sejumlah 6,63%. Program yang menunjang keberhasilan pencapaian Nilai IKM tersebut adalah Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Efisiensi penggunaan sumber daya sejumlah 6,63% tersebut dilakukan melalui optimalisasi penghematan penggunaan barang habis pakai pelayanan sehingga tidak boros menggunakan anggaran, efisiensi kontrak pengadaan barang jasa penyediaan barang operasional, dan optimalisasi penggunaan sarpras pelayanan dengan baik yang dapat meminimalisir kerusakan sarpras, serta sisa kontrak pengadaan barang.

b) Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai standar

Pada tahun 2021 terdapat pemutakhiran program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2021, sehingga terdapat penggunaan nomenklatur nama program, kegiatan, subkegiatan, serta perubahan indikator kinerja. Oleh karena itu terdapat pergantian indikator kinerja mulai tahun 2021 s.d 2023.

Capaian realisasi indikator kinerja kegiatan jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai standar di tahun 2023 sejumlah 48 dokumen telah mencapai target tahun 2023 sejumlah 48 dokumen. Capaian kinerja tersebut stabil tercapai mulai tahun 2021 s.d 2023, serta telah mencapai target akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018–2023.

Di tahun 2023, dokumen perencanaan yang disusun sejumlah 12 dokumen meliputi adalah:

1. Rencana Kerja/Renja PD Tahun 2024;
2. Perubahan Rencana Kerja/Renja PD Tahun 2023;
3. Rancangan Rencana Strategis/Renstra PD Tahun 2024-2026;
4. Kerangka Acuan Kerja/KAK Sub Kegiatan PD Tahun 2024;
5. Kerangka Acuan Kerja/KAK Perubahan Subkegiatan PD Tahun 2023;
6. Gender Budget Statement/GBS Subkegiatan Tahun 2024;
7. Gender Budget Statement/GBS Perubahan Subkegiatan Tahun 2023;

8. Gender Analysis Pathway/GAP Subkegiatan Tahun 2024;
9. Gender Analysis Pathway/GAP Perubahan Subkegiatan Tahun 2023;
10. Perjanjian Kinerja PD (Kepala Dinas s.d staf) Tahun 2023;
11. Rencana Tindak Pengendalian/RTP PD Tahun 2023;
12. Rencana Aksi PD Tahun 2023.

Dokumen penganggaran yang disusun di tahun 2023 sejumlah 4 dokumen yaitu:

1. Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD TA 2024;
2. Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD TA 2023;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD TA 2023;
4. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD TA 2023.

Dokumen evaluasi dan pelaporan kinerja yang disusun di tahun 2023 sejumlah 32 dokumen yang meliputi:

1. Evaluasi Renstra PD Tahun 2022;
2. Evaluasi Renja PD Triwulanan Tahun 2023;
3. Evaluasi Capaian IKU PD Triwulanan Tahun 2023;
4. Evaluasi Capaian Output Dokumen Kependudukan PD Triwulanan Tahun 2023;
5. Evaluasi Rencana Aksi PD Triwulanan Tahun 2023;
6. Evaluasi Kinerja PD Bulanan Tahun 2023 (Program, Kegiatan, Subkegiatan, Fisik dan Anggaran);
7. LKJIP Dinas Dukcapil Tahun 2022;
8. LPPD dan LKPJ Dinas Dukcapil Tahun 2022.

Keberhasilan dalam penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja adalah :

1. Komitmen pimpinan dalam peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan, anggaran, dan evaluasi PD;
2. Sinergitas kebijakan penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kudus (OPD terkait);
3. Adanya tuntutan peningkatan implementasi SAKIP Perangkat Daerah khususnya peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan;
4. Peningkatan kompetensi aparatur penyusun dokumen perencanaan.

Guna pencapaian sasaran kinerja kegiatan berupa dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai standar tahun 2023, sumber daya anggaran kegiatan yang digunakan sejumlah Rp.74.260.820,- dan terealisasi sejumlah Rp.73.261.478,- sehingga mempunyai SILPA sejumlah Rp.999.342,-. Target indikator jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai standar tahun 2023 sejumlah 48 dokumen, terealisasi sejumlah 48 dokumen, dan terdapat efisiensi sejumlah 1,35%. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai standar adalah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Efisiensi penggunaan sumber daya sejumlah 1,35% tersebut dilakukan melalui optimalisasi penghematan penggunaan barang habis pakai pelayanan sehingga tidak boros menggunakan anggaran, efisiensi penyediaan barang jasa operasional.

c) Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah dokumen administrasi pertanggungjawaban anggaran, dan dokumen pelaporan keuangan yang tersusun sesuai standar

Capaian realisasi indikator kinerja kegiatan Jumlah dokumen administrasi pertanggungjawaban anggaran, dan dokumen pelaporan keuangan yang tersusun sesuai standar di tahun 2023 sejumlah 63 dokumen telah mencapai target tahun 2023 sejumlah 63 dokumen. Capaian kinerja tersebut stabil tercapai mulai tahun 2021 s.d 2023, serta telah mencapai target akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018–2023.

Dokumen administrasi pertanggungjawaban anggaran, dan dokumen pelaporan keuangan yang tersusun di tahun 2023 adalah:

1. Laporan SPJ Fungsional SKPD Bulanan Tahun 2023;
2. Laporan SPJ Administratif SKPD Bulanan Tahun 2023;
3. Laporan Prognosis Keuangan SKPD Semesteran Tahun 2023;
4. Laporan Keuangan SKPD Tahun 2022;
5. Laporan Rekapitulasi Daftar Transaksi Harian (DTH) Pajak SKPD Bulanan Tahun 2023;
6. Laporan Pajak Daerah SKPD Bulanan Tahun 2023;
7. Laporan Buku Pajak per Jenis Pajak SKPD Bulanan Tahun 2023.

Keberhasilan dalam penyusunan dokumen pertanggungjawaban anggaran, dan dokumen pelaporan keuangan adalah :

1. Komitmen seluruh pengelola keuangan dalam melaksanakan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan standar yang ada;
2. Koordinasi dan komunikasi yang baik antara pengelola keuangan internal Perangkat Daerah maupun dengan BPPKAD Kabupaten Kudus, dan Bank Jateng;
3. Adanya petunjuk pelaksanaan pengelolaan APBD sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan di dinas.

Guna pencapaian sasaran kinerja kegiatan berupa dokumen pertanggungjawaban anggaran, dan dokumen pelaporan keuangan tahun 2023, sumber daya anggaran kegiatan yang digunakan sejumlah Rp.4.177.140.000,- dan terealisasi sejumlah Rp.3.876.662.399,- sehingga mempunyai SILPA sejumlah Rp.300.477.601,-. Target indikator jumlah dokumen pertanggungjawaban anggaran, dan dokumen pelaporan keuangan tahun 2023 sejumlah 63 dokumen, terealisasi sejumlah 63 dokumen, dan terdapat efisiensi sejumlah 7,19%. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai standar adalah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Efisiensi penggunaan sumber daya sejumlah 7,19% tersebut dilakukan melalui optimalisasi penghematan penggunaan barang habis pakai operasional, ketepatan waktu dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan.

d) Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah dokumen kepegawaian sesuai standar

Capaian realisasi indikator kinerja kegiatan Jumlah dokumen kepegawaian sesuai standar di tahun 2023 sejumlah 12 dokumen telah mencapai target tahun 2023 sejumlah 12 dokumen. Capaian kinerja tersebut stabil tercapai mulai tahun 2021 s.d 2023, serta telah mencapai target akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018–2023.

Dokumen administrasi kepegawaian yang tersusun di tahun 2023 adalah:

1. SKP ASN Tahun 2023;
2. Evaluasi SKP Triwulanan Tahun 2023;
3. Penetapan SPK NonASN Tenaga Kontrak Tahun 2023;
4. Laporan Kenaikan Pangkat;
5. Pelaporan LHKPN dan LHKASNTahun 2022;
6. Pelaporan SPT Tahunan ASN Tahun 2022;
7. Pelaporan Cuti dan Kehadiran ASN Bulanan Tahun 2023;
8. Pelaporan Pengajuan Pensiun yang diajukan di Tahun 2023;
9. Laporan Kenaikan Gaji Berkala PNS di Tahun 2023;
10. Identifikasi Kebutuhan Diklat/Bimtek Tahun 2023;
11. Dokumen Analisa Jabatan, Peta Jabatan Tahun 2023;
12. Dokumen Analisa Beban Kerja Tahun 2023.

Keberhasilan dalam penyusunan dokumen administrasi kepegawaian adalah :

1. Komitmen yang baik seluruh aparatur dalam melaksanakan pengelolaan data pegawai sesuai dengan standar yang ada;
2. Koordinasi dan komunikasi yang baik antara pengelola kepegawaian maupun dengan Bagian Organisasi, BKPSDM Kabupaten Kudus, dan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri.

Guna pencapaian sasaran kinerja kegiatan berupa Jumlah dokumen kepegawaian sesuai standar di tahun 2023, sumber daya anggaran kegiatan yang digunakan sejumlah Rp.5.127.000,- dan terealisasi sejumlah Rp.4.345.000,- sehingga mempunyai SILPA sejumlah Rp.872.000,-. Target indikator jumlah dokumen administrasi kepegawaian tahun 2023 sejumlah 12 dokumen, terealisasi sejumlah 12 dokumen, dan terdapat efisiensi sejumlah 6,80%. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian penyusunan dokumen administrasi kepegawaian sesuai standar adalah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Efisiensi penggunaan sumber daya sejumlah 6,80% tersebut dilakukan melalui optimalisasi penghematan penggunaan barang habis pakai operasional, ketepatan waktu dalam pengelolaan kepegawaian dan penyusunan dokumen administrasi kepegawaian.

e) Indikator Kinerja Kegiatan: Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar

Capaian realisasi indikator kinerja kegiatan Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar di tahun 2023 sejumlah 100% telah mencapai target tahun 2023 sejumlah 100%. Capaian kinerja tersebut stabil tercapai mulai tahun 2021 s.d 2023, serta telah mencapai target akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018–2023.

Cakupan layanan pendukung perkantoran seluruhnya tercapai 100% di tahun 2023 adalah:

1. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebanyak 1 paket;
2. Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak 1 paket;
3. Peralatan Rumah Tangga sebanyak 1 paket;
4. Bahan Logistik Kantor sebanyak 1 paket;
5. Barang Cetakan dan Penggandaan sebanyak 1 paket;
6. Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 1 dokumen;
7. Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu sebanyak 12 laporan;
8. Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 12 laporan.

Keberhasilan dalam cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar adalah :

1. Komitmen seluruh pengelola keuangan dalam melaksanakan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan standar yang ada;
2. Koordinasi dan komunikasi yang baik antara pengelola keuangan internal Perangkat Daerah maupun dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi serta stakeholder terkait.

Guna pencapaian sasaran kinerja kegiatan berupa cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar di tahun 2023, sumber daya anggaran kegiatan yang digunakan sejumlah Rp.170.715.960,- dan terealisasi sejumlah Rp.159.099.246,- sehingga mempunyai SILPA sejumlah Rp.11.616.714,-. Target indikator cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar sebesar 100%, terealisasi sejumlah 100%, dan terdapat efisiensi sejumlah 6,80%. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar adalah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Efisiensi penggunaan sumber daya sejumlah 6,80% tersebut dilakukan melalui optimalisasi penghematan penggunaan barang habis pakai operasional, ketepatan waktu dalam pelaksanaan layanan pendukung perkantoran sesuai standar.

f) Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah pengadaan peralatan kantor sesuai ketentuan

Capaian realisasi indikator kinerja kegiatan Jumlah pengadaan peralatan kantor sesuai ketentuan di tahun 2023 sebanyak 2 unit telah mencapai target tahun 2023 sebanyak 2 unit. Capaian kinerja tersebut stabil tercapai mulai tahun 2021 s.d 2023, serta telah mencapai target akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018–2023.

Jumlah pengadaan peralatan kantor sesuai ketentuan di tahun 2023 tercapai 100% adalah:

1. Pengadaan mebel sejumlah 2 unit;
2. Pengadaan peralatan dan mesin sejumlah 2 unit.

Guna pencapaian sasaran kinerja kegiatan berupa Jumlah pengadaan peralatan kantor sesuai ketentuan di tahun 2023, sumber daya anggaran kegiatan yang digunakan sejumlah Rp.35.376.000,- dan terealisasi sejumlah Rp.34.480.000,- sehingga mempunyai SILPA sejumlah Rp.896.000,-. Target indikator cakupan jumlah pengadaan peralatan kantor sesuai ketentuan sejumlah 2 unit, terealisasi sejumlah 2 unit, dan terdapat efisiensi sejumlah 2,53%. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian jumlah pengadaan peralatan kantor sesuai ketentuan adalah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Efisiensi penggunaan sumber daya sejumlah 2,53% tersebut dilakukan melalui optimalisasi penghematan pengadaan mebel dan pengadaan peralatan, ketepatan waktu dalam pelaksanaan pengadaan peralatan kantor sesuai ketentuan.

g) Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan administrasi kependudukan

Capaian realisasi indikator kinerja kegiatan Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan administrasi kependudukan di tahun 2023 sejumlah 12 laporan telah mencapai target tahun 2023 sejumlah 12 laporan. Capaian kinerja tersebut stabil tercapai mulai tahun 2021 s.d 2023, serta telah mencapai target akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018–2023.

Dokumen administrasi laporan penggunaan jasa penunjang urusan administrasi kependudukan yang tersusun di tahun 2023 adalah:

1. Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
2. Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
3. Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Guna pencapaian sasaran kinerja kegiatan berupa jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan administrasi kependudukan di tahun 2023, sumber daya anggaran kegiatan yang digunakan sejumlah Rp.373.656.000,- dan terealisasi sejumlah Rp.365.620.608,- sehingga mempunyai SILPA sejumlah Rp.8.035.392,-. Target indikator cakupan jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan administrasi kependudukan di tahun 2023 sejumlah 12 laporan, terealisasi sejumlah 12 laporan, dan terdapat efisiensi sejumlah 2,15%. Kegiatan yang menunjang

keberhasilan pencapaian jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan administrasi kependudukan adalah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Efisiensi penggunaan sumber daya sejumlah 2,15% tersebut dilakukan melalui optimalisasi penghematan penggunaan barang habis pakai operasional, ketepatan waktu dalam pelaksanaan penggunaan jasa penunjang urusan administrasi kependudukan.

h) Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan

Capaian realisasi indikator kinerja kegiatan Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan sejumlah 12 laporan telah mencapai target tahun 2023 sejumlah 12 laporan. Capaian kinerja tersebut stabil tercapai mulai tahun 2021 s.d 2023, serta telah mencapai target akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018–2023.

Laporan pemeliharaan barang milik daerah sesuai ketentuan di tahun 2023 adalah:

1. Laporan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya;
2. Laporan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.

Guna pencapaian sasaran kinerja kegiatan berupa jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah di tahun 2023, sumber daya anggaran kegiatan yang digunakan sejumlah Rp.126.676.750,- dan terealisasi sejumlah Rp.120.581.721,- sehingga mempunyai SILPA sejumlah Rp.6.095.029,-. Target indikator jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah di tahun 2023 sejumlah 12 laporan, terealisasi sejumlah 12 laporan, dan terdapat efisiensi sejumlah 4,81%. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah adalah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Efisiensi penggunaan sumber daya sejumlah 4,81% tersebut dilakukan melalui optimalisasi penghematan penggunaan anggaran dalam pemeliharaan barang milik daerah, ketepatan waktu dalam pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah sesuai ketentuan.

3. KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

a) Indikator Kinerja Program: Cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Tabel 3.3
Capaian Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2023

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja sebelumnya				Capaian Kinerja Tahun 2023			Target Akhir Renstra (2023)	% Capaian 2023 terhadap Target Akhir 2023	Target Nasional 2023	% Capaian 2023 terhadap Target Nasional
			2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian kinerja				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(9/8)	11	12=(9/11)	13	14
INDIKATOR KINERJA PROGRAM													
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan	Cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	99,74%	99,18%	98,54%	98,97%	100%	99,64%	99,64%	100%	99,64%	99,40%	100,24%
Rata-rata % capaian kinerja program									99,64%				
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN													
1	Meningkatnya jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk sesuai standar	NA	NA	136.467 dok	85.099 dok	169.000 lbr	167.303 lbr	99%	169.000 lbr	99%	-	-
Rata-rata % capaian kinerja kegiatan									99,00%				

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kudus

Capaian realisasi Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tahun 2023 sejumlah 99.64% belum mencapai target tahun 2023 sejumlah 100%. Capaian realisasi Kepemilikan KTP mengalami trend menurun mulai tahun 2019 s.d 2021, dan mulai meningkat tahun 2022 s.d 2023. Capaian realisasi Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tahun 2023 belum mencapai target akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023, akan tetapi capaian tersebut telah melampaui standar nasional kinerja terkait administrasi kependudukan pada tahun 2023 berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu Cakupan Kepemilikan KTP sebesar 99.40%.

Tabel 3.4
Cakupan Kepemilikan KTP di Kabupaten Kudus Tahun 2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	WKTP	KEPEMILIKAN KTP			
				SUDAH MEMILIK	SUDAH MEMILIKI (%)	BELUM MEMILIKI	BELUM MEMILIKI (%)
1	KALIWUNGU	106,335	77,067	76,805	99.66%	262	0.34%
2	KOTA KUDUS	91,337	68,411	68,152	99.62%	259	0.38%
3	JATI	110,267	81,319	81,021	99.63%	298	0.37%
4	UNDAAN	79,785	59,323	59,110	99.64%	213	0.36%
5	MEJOBBO	79,772	58,444	58,242	99.65%	202	0.35%
6	JEKULO	111,942	82,751	82,470	99.66%	281	0.34%
7	BAE	75,357	55,130	54,928	99.63%	202	0.37%
8	GEBOG	107,821	78,531	78,268	99.67%	263	0.33%
9	DAWE	110,815	82,084	81,882	99.75%	202	0.25%
	TOTAL	873,431	643,060	640,878	99.66%	2,182	0.34%

Sumber : DKB Semester II 2023

Belum tercapainya target cakupan kepemilikan KTP karena masih terdapat penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP. Jumlah penduduk Wajib KTP (WKTP) Tahun 2023 di Kabupaten Kudus sejumlah 643.060 orang, dimana sejumlah 640.878 orang (99.66%) telah melakukan perekaman dan memiliki KTP, sedangkan sisanya sejumlah 2.182 orang (0.34%) belum memiliki KTP yang disebabkan karena penduduk tersebut belum melakukan perekaman KTP (penduduk usia pemula, penduduk yang berada di luar kota, luar negeri (bekerja) dan tidak diketahui keberadaannya).

Upaya yang telah dilakukan saat ini :

- Penyelesaian target perekaman KTP usia pemula melalui perekaman massal jemput bola di SMA/SMK/MA se-Kabupaten Kudus yang telah dikoordinasikan pelaksanaannya melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- Perekaman massal jemput bola di Desa/Kelurahan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Pemanggilan Perekaman KTP Belum Rekam kepada Wajib KTP yang belum rekam berdasarkan data dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri;
- Pelayanan jemput bola perekaman KTP penduduk rentan seperti korban bencana banjir, orang terlantar (panti asuhan, panti sosial, panti tuna netra), ODGJ, penghuni lapas, disabilitas, dan sakit keras;
- Pelayanan terintegrasi penerbitan dokumen administrasi kependudukan atas peristiwa kedatangan penduduk dari luar kota dengan Paket 3in1 yaitu Kartu Keluarga, KTP dan Kartu Identitas Anak (apabila dengan anak).

Alternatif solusi di periode mendatang:

- Peningkatan capaian kepemilikan KTP melalui optimalisasi pelayanan jemput bola di desa/kelurahan. SMA/SMK/MA; dan pelayanan extra time (Sabtu/Minggu/Hari Libur Nasional) perekaman KTP di dinas dan kecamatan.

Guna pencapaian sasaran kinerja program berupa Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sumber daya anggaran yang digunakan sejumlah Rp.2.779.538.260,- dan terealisasi sejumlah Rp.2.656.033.826,- sehingga mempunyai SILPA sejumlah Rp.123.504.434,-. Target indikator Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tahun 2023 sejumlah 100%, terealisasi sejumlah 99,64%, sehingga tidak terdapat efisiensi karena capaian output kegiatan belum tercapai disebabkan sedikitnya jumlah penerbitan dokumen pindah/datang penduduk. Adapun penerbitan KTP dan KIA sudah melampaui target yang ditetapkan. Program yang menunjang pencapaian Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut adalah Program Pendaftaran Penduduk.

b) Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk

Capaian jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk (KTP, KIA, Surat Pindah-Datang Luar Kota dan Kartu Keluarga) pada tahun 2023 sejumlah 167.303 dokumen (99%) belum mencapai target tahun 2023 sejumlah 169.000 dokumen. Capaian tersebut belum mencapai target akhir Renstra Tahun 2018-2023. Belum tercapainya total capaian penerbitan tersebut disebabkan turunnya capaian penerbitan Surat Pindah-Datang Luar Kota dan Kartu Keluarga. Perpindahan dan kedatangan penduduk (migrasi) antar luar kota, tidak dapat diintervensi penambahan/pengurangannya, karena menyesuaikan dengan peristiwa kependudukan setiap penduduk.

4. KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

a) Indikator Kinerja Program: Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun

Tabel 3.5
Capaian Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2023

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja sebelumnya				Capaian Kinerja Tahun 2023			Target Akhir Renstra (2023)	% Capaian 2023 terhadap Target Akhir 2023	Target Nasional 2023	% Capaian 2023 terhadap Target Nasional
			2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian kinerja				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(9/8)	11	12=(11/10)	13	14
INDIKATOR KINERJA PROGRAM													
1	Meningkatnya kualitas administrasi perkantoran pendukung pelayanan adminduk	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun	92,18%	97,55%	98,01%	98,49%	100,00%	99,48%	99,48%	100%	99,48%	98%	101,51%
Rata-rata % capaian kinerja program									99,48%				
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN													
1	Meningkatnya jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil	Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil sesuai standar	NA	NA	NA	29.291 duk	33.930 lbr	29.775 lbr	88%	33.930 lbr	88%	-	-
Rata-rata % capaian kinerja kegiatan									88,00%				

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kudus

Capaian realisasi Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun Tahun 2023 sejumlah 99.48% belum mencapai target tahun 2023 sejumlah 100%. Capaian realisasi Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun mengalami trend naik mulai tahun 2019 s.d 2023. Capaian realisasi Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun Tahun 2023 belum mencapai target akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023, akan tetapi capaian tersebut telah melampaui standar nasional kinerja terkait administrasi kependudukan pada tahun 2023 berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun sebesar 99.40%.

Tabel 3.6
Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun di Kabupaten Kuds Tahun 2023

NO	KECAMATAN	PENDUDUK USIA 0-18 TAHUN			KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN						% KEPEMILIKAN
		LK	PR	JML	BELUM MEMILIKI			MEMILIKI			
					LK	PR	JML	LK	PR	JML	
1	KALIWUNGU	15,862	14,854	30,716	11	5	16	15,851	14,849	30,700	99.95%
2	KOTA KUDUS	12,568	11,829	24,397	8	2	10	12,560	11,827	24,387	99.96%
3	JATI	15,960	14,727	30,687	7	7	14	15,953	14,720	30,673	99.95%
4	UNDAAN	11,128	10,372	21,500	2	12	14	11,126	10,360	21,486	99.93%
5	MEJOBLO	11,574	10,858	22,432	4	0	4	11,570	10,858	22,428	99.98%
6	JEKULO	15,786	14,926	30,712	10	9	19	15,776	14,917	30,693	99.94%
7	BAE	10,908	10,303	21,211	3	2	5	10,905	10,301	21,206	99.98%
8	GEBOG	15,911	14,979	30,890	3	1	4	15,908	14,978	30,886	99.99%
9	DAWE	15,677	14,609	30,286	4	3	7	15,673	14,606	30,279	99.98%
	TOTAL	125,374	117,457	242,831	52	41	93	125,322	117,416	242,738	99.96%

Sumber : Data DKB Semester II Tahun 2023

Tahun 2023, Penduduk usia 0–18 tahun berjumlah 242.831 orang, dimana sejumlah 242.738 orang (99.96%) telah memiliki akta kelahiran dan 93 orang (0.04%) belum memiliki akta kelahiran karena belum melakukan pengurusan akta kelahiran.

Upaya yang telah dilakukan saat ini :

- Pelayanan terintegrasi penerbitan dokumen administrasi kependudukan atas peristiwa kelahiran dengan Paket 3in1 yaitu Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak, yang dilakukan di semua titik pelayanan baik melalui pelayanan tatap muka maupun daring;
- Kerjasama pelayanan pencatatan kelahiran bayi baru lahir Paket 3in1 dengan Rumah Sakit Daerah dan Swasta, yang kemudian dokumen jadi diantar ke Rumah Sakit Daerah dan Swasta tersebut sebelum ibu dan bayi pulang ke rumah;
- Pelayanan Paket 3in1 di seluruh Desa/Kelurahan oleh Petugas Registrasi Desa/Kelurahan, dimana dokumen Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dapat langsung dicetak dan diterima warga, sedangkan dokumen KIA akan diantar melalui Petugas Delivery Order ke Desa/rumah warga;
- Pelayanan Paket 3in1 di seluruh kecamatan melalui inovasi Layanan PADUKA, dimana dokumen Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KIA dapat langsung dicetak dan diterima pemohon saat itu juga;
- Pelayanan Paket 3in1 melalui relawan petugas stakeholder desa (Karang Taruna, PKK, Bidan Desa) yang tergabung dalam Program RUMAH PAMAN CAPIL (Rumah Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil), swadaya mandiri yang tidak memperoleh honor dan merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat desa khusus dalam pengajuan dokumen kependudukan.

Alternatif solusi di periode mendatang:

- Sosialisasi kebijakan adminduk. agar masyarakat melakukan pemutakhiran data kependudukan;
- Optimalisasi pelayanan tatap muka di desa/kelurahan, kecamatan dan dinas serta pelayanan daring dengan Standar Pelayanan 1x24 jam;
- Pelayanan terintegrasi pencatatan peristiwa kelahiran 3in1 (KK, Akta Kelahiran, KIA).

Guna pencapaian sasaran kinerja program berupa Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun, sumber daya anggaran yang digunakan sejumlah Rp.782.089.028,- dan terealisasi sejumlah

Rp.771.785.398,- sehingga mempunyai SILPA sejumlah Rp.10.303.630,-. Target indikator Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun sejumlah 100%, terealisasi sejumlah 99,48%. Terdapat efisiensi sejumlah 1.28% yang diperoleh melalui sisa kontrak pengadaan barang, dan efisiensi pemakaian bahan operasional. Program yang menunjang pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun tersebut adalah Program Pelayanan Pencatatan Sipil.

b) Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil sesuai standar

Capaian jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, dan Akta Pencatatan Sipil Lainnya) pada tahun 2023 sejumlah 29.775 dokumen (88%) belum mencapai target tahun 2023 sejumlah 33.930 dokumen. Capaian tersebut belum mencapai target akhir Renstra Tahun 2018-2023. Belum tercapainya total capaian penerbitan tersebut disebabkan turunnya capaian penerbitan Akta Kelahiran (di atas usia 18 tahun), Akta Perkawinan dan Akta Perceraian. Disisi yang lain, jumlah penerbitan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun meningkat dan menunjang pencapaian target nasional kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun pada tahun 2023. Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022. Di tahun 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus menempati peringkat ke-5 terbaik atas Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun. Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil adalah Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil.

5. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA

a) Indikator Kinerja Program: Cakupan pengelolaan database kependudukan

Tabel 3.7
Capaian Perjanjian Kinerja Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2023

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja sebelumnya				Capaian Kinerja Tahun 2023			Target Akhir Renstra (2023)	% Capaian 2023 terhadap Target Akhir 2023	Target Nasional 2023	% Capaian 2023 terhadap Target Nasional
			2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian kinerja				
1			4	5	6	7	8	9	10=(9/8)	11	12=(11/10)	13	14
INDIKATOR KINERJA PROGRAM													
1	Meningkatnya kualitas data dan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten yang akurat	Cakupan pengelolaan database kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100.00%	-	-
Rata-rata % capaian kinerja program									100.00%				
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN													
1	Meningkatnya 1 instansi yang memanfaatkan data kependudukan sesuai standar	Jumlah instansi yang memanfaatkan data kependudukan sesuai standar	NA	1 instansi	6 instansi	11 instansi	15 instansi	11 instansi	73%	15 instansi	73%	-	-
Rata-rata % capaian kinerja kegiatan									73.33%				

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kudus

Capaian realisasi Cakupan Pengelolaan Database Kependudukan sebesar 100% telah mencapai target tahun 2023 sejumlah 100%. Capaian realisasi Cakupan Pengelolaan Database Kependudukan tahun mengalami trend stabil mulai tahun 2019 s.d 2023. Capaian realisasi Cakupan Pengelolaan Database Kependudukan Tahun 2023 telah mencapai target akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023. Cakupan pengelolaan database kependudukan

merupakan updating dan pemutakhiran data kependudukan skala kabupaten per semester yang dilakukan dengan Kemendagri sehingga menghasilkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang kemudian data tersebut digunakan sebagai dasar pelayanan publik.

Guna pencapaian sasaran kinerja program berupa Cakupan Pengelolaan Database Kependudukan, sumber daya anggaran yang digunakan sejumlah Rp.815.575.750,- dan terealisasi sejumlah Rp.798.216.644,- sehingga mempunyai SILPA sejumlah Rp.17.359.106,-. Terdapat efisiensi sejumlah 2.13% yang diperoleh melalui efektifitas penggunaan anggaran dalam mencapai target kinerja, efisiensi nilai kontrak pengadaan barang/jasa. Program yang menunjang pencapaian Cakupan Pengelolaan Database Kependudukan tersebut adalah Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data. Upaya yang telah dilakukan guna menunjang keberhasilan kinerja program adalah melalui peningkatan kapasitas aparatur pengelola data kependudukan, optimalisasi koordinasi pengelolaan data kependudukan dengan Dispermasdes Dukcapil Provinsi Jawa Tengah dan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, dan pengelolaan data kependudukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kemendagri.

b) Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah instansi yang memanfaatkan data kependudukan sesuai standar

Capaian jumlah instansi yang memanfaatkan data kependudukan sesuai standar (berdasarkan PKS Pemanfaatan Data Kependudukan) pada tahun 2023 sejumlah 11 instansi belum dapat mencapai target tahun 2023 sejumlah 15 instansi. Belum adanya penambahan instansi yang memanfaatkan data kependudukan disebabkan karena belum adanya penambahan PKS Pemanfaatan Data Kependudukan di Tahun 2023. Belum adanya penambahan PKS tersebut disebabkan karena belum turunnya persetujuan pengajuan PKS baru tahun 2023 yang telah diajukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus kepada Kemendagri. Telah terdapat upaya penambahan baru PKS pemanfaatan data kependudukan di tahun 2023 dengan 9 Kecamatan, yang telah diusulkan ke Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri pada bulan September s.d Oktober tahun 2023, akan tetapi s.d akhir tahun 2023 belum turun persetujuan PKS tersebut karena masih dalam proses verifikasi Tim Verifikasi Persetujuan PKS Pemanfaatan Data Kependudukan di lingkungan Kemendagri yang melibatkan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Inspektorat Jenderal Kemendagri dan Biro Hukum Sesditjen Kemendagri.

6. KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Tabel 3.8
Capaian Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2023

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja sebelumnya				Capaian Kinerja Tahun 2023			Target Akhir Renstra (2023)	% Capaian 2023 terhadap Target Akhir 2023	Target Nasional 2023	% Capaian 2023 terhadap Target Nasional
			2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian kinerja				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(9/8)	11	12=(9/11)	13	14
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN													
1	Tersusunnya dokumen perencanaan, dokumen anggaran, dokumen pelaporan kegiatan/kinerja yang tersusun sesuai standar	Jumlah dokumen perencanaan, dokumen anggaran, dokumen pelaporan kegiatan/kinerja yang tersusun sesuai standar	NA	NA	NA	NA	19 dok	19 dok	100%	19 dok	100%	-	-
2	Tertaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jmh dok evaluasi OPD Jmh dok evaluasi PD	NA	NA	NA	NA	29 dok	29 dok	100%	29 dok	100%	-	-
3	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	NA	NA	NA	NA	325 orang/bulan	325 orang/bulan	100%	325 orang/bulan	100%	-	-
4	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jmh dok adm pertanggungjawaban keuangan	NA	NA	NA	NA	63 dok	63 dok	100%	63 dok	100%	-	-
Rata-rata % capaian kinerja sub kegiatan									100.00%				

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kudus

a) Indikator Kinerja Sub Kegiatan: Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai standar

Capaian realisasi indikator kinerja sub kegiatan jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai standar di tahun 2023 sejumlah 19 dokumen telah mencapai target tahun 2023 sejumlah 19 dokumen. Capaian kinerja tersebut stabil tercapai mulai tahun 2021 s.d 2023, serta telah mencapai target akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018–2023.

Di tahun 2023, dokumen perencanaan dokumen yang disusun meliputi adalah:

1. Rencana Kerja/Renja PD Tahun 2024;
2. Perubahan Rencana Kerja/Renja PD Tahun 2023;
3. Rancangan Rencana Strategis/Renstra PD Tahun 2024-2026;
4. Kerangka Acuan Kerja/KAK Sub Kegiatan PD Tahun 2024;
5. Kerangka Acuan Kerja/KAK Perubahan Subkegiatan PD Tahun 2023;
6. Gender Budget Statement/GBS Subkegiatan Tahun 2024;
7. Gender Budget Statement/GBS Perubahan Subkegiatan Tahun 2023;
8. Gender Analysis Pathway/GAP Subkegiatan Tahun 2024;
9. Gender Analysis Pathway/GAP Perubahan Subkegiatan Tahun 2023;
10. Perjanjian Kinerja PD (Kepala Dinas s.d staf) Tahun 2023;
11. Rencana Tindak Pengendalian/RTP PD Tahun 2023;
12. Rencana Aksi PD Tahun 2023.

Dokumen penganggaran yang disusun di tahun 2023 yaitu:

1. Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD TA 2024;
2. Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD TA 2023;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD TA 2023;
4. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD TA 2023.

Guna pencapaian sasaran kinerja kegiatan berupa dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai standar tahun 2023, sumber daya anggaran kegiatan yang digunakan sejumlah Rp.45.672.520,-

dan terealisasi sejumlah Rp.45.149.478,- sehingga mempunyai SILPA sejumlah Rp.523.042,-. Target indikator jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai standar tahun 2023 sejumlah 19 dokumen, terealisasi sejumlah 19 dokumen. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai standar adalah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Terdapat efisiensi anggaran sejumlah 1.35% atas realisasi kinerja kegiatan yang mencapai target kinerja kegiatan, dan adanya efektivitas pelaksanaan tugas dan sumber daya yang ada dalam pencapaian target kinerja.

b) Indikator Kinerja Sub Kegiatan: Jumlah dokumen evaluasi OPD

Capaian realisasi indikator kinerja subkegiatan Jumlah dokumen evaluasi OPD sesuai standar di tahun 2023 sejumlah 29 dokumen telah mencapai target tahun 2023 sejumlah 29 dokumen. Capaian kinerja tersebut stabil tercapai mulai tahun 2021 s.d 2023, serta telah mencapai target akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018–2023.

Dokumen evaluasi dan pelaporan kinerja yang disusun di tahun 2023 meliputi:

1. Evaluasi Renstra PD Tahun 2022;
2. Evaluasi Renja PD Triwulanan Tahun 2023;
3. Evaluasi Capaian IKU PD Triwulanan Tahun 2023;
4. Evaluasi Capaian Output Dokumen Kependudukan PD Triwulanan Tahun 2023;
5. Evaluasi Rencana Aksi PD Triwulanan Tahun 2023;
6. Evaluasi Kinerja PD Bulanan Tahun 2023 (Program, Kegiatan, Subkegiatan, Fisik dan Anggaran);
7. LKJIP Dinas Dukcapil Tahun 2022;
8. LPPD dan LKPJ Dinas Dukcapil Tahun 2022.

Guna pencapaian sasaran kinerja sub kegiatan berupa Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tahun 2023, sumber daya anggaran kegiatan yang digunakan sejumlah Rp.28.588.300,- dan terealisasi sejumlah Rp.28.112.000,- sehingga mempunyai SILPA sejumlah Rp.476.300,- dari sisa anggaran pengadaan barang, serta terdapat efisiensi anggaran sejumlah 1.67%. Target indikator Jumlah dokumen evaluasi OPD tahun 2023 sejumlah 29 dokumen, terealisasi sejumlah 29 dokumen. Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian penyusunan dokumen evaluasi adalah Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah.

Keberhasilan dalam penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja adalah :

1. Komitmen pimpinan dalam peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan, anggaran, dan evaluasi PD;
2. Sinergitas kebijakan penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kudus (OPD terkait);
3. Adanya tuntutan peningkatan implementasi SAKIP Perangkat Daerah khususnya peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan;

4. Peningkatan kompetensi aparatur penyusun dokumen perencanaan.

c) Indikator Kinerja Sub Kegiatan: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Capaian realisasi indikator kinerja sub kegiatan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN di tahun 2023 sejumlah 325 orang/bulan telah mencapai target tahun 2023 sejumlah 325 orang/bulan. Capaian kinerja tersebut stabil tercapai mulai tahun 2021 s.d 2023, serta telah mencapai target akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018–2023.

Guna pencapaian sasaran kinerja sub kegiatan berupa Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2023, sumber daya anggaran kegiatan yang digunakan sejumlah Rp.4.121.007.000,- dan terealisasi sejumlah Rp.3.824.705.499,- sehingga mempunyai SILPA sejumlah Rp.296.301.501,- dan terdapat efisiensi anggaran sejumlah 7.19% yang didapat dari sisa anggaran pembayaran gaji dan TPP ASN. Target indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2023 sejumlah 325 orang/bulan, terealisasi sejumlah 325 orang/bulan. Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian penyusunan dokumen evaluasi OPD sesuai standar adalah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

d) Indikator Kinerja Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan

Capaian realisasi indikator kinerja sub kegiatan Jumlah dokumen administrasi pertanggungjawaban keuangan di tahun 2023 sejumlah 63 dokumen telah mencapai target tahun 2023 sejumlah 63 dokumen. Capaian kinerja tersebut stabil tercapai mulai tahun 2021 s.d 2023, serta telah mencapai target akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018–2023.

Dokumen administrasi pertanggungjawaban anggaran, dan dokumen pelaporan keuangan yang tersusun di tahun 2023 adalah:

1. Laporan SPJ Fungsional SKPD Bulanan Tahun 2023;
2. Laporan SPJ Administratif SKPD Bulanan Tahun 2023;
3. Laporan Prognosis Keuangan SKPD Semesteran Tahun 2023;
4. Laporan Keuangan SKPD Tahun 2022;
5. Laporan Rekapitulasi Daftar Transaksi Harian (DTH) Pajak SKPD Bulanan Tahun 2023;
6. Laporan Pajak Daerah SKPD Bulanan Tahun 2023;
7. Laporan Buku Pajak per Jenis Pajak SKPD Bulanan Tahun 2023.

Keberhasilan dalam penyusunan dokumen pertanggungjawaban anggaran, dan dokumen pelaporan keuangan adalah :

1. Komitmen seluruh pengelola keuangan dalam melaksanakan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan standar yang ada;
2. Koordinasi dan komunikasi yang baik antara pengelola keuangan internal Perangkat Daerah maupun dengan BPPKAD Kabupaten Kudus, dan Bank Jateng;
3. Adanya petunjuk pelaksanaan pengelolaan APBD sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan di dinas.

Guna pencapaian sasaran kinerja sub kegiatan berupa dokumen pertanggungjawaban anggaran, dan dokumen pelaporan keuangan tahun 2023, sumber daya anggaran kegiatan yang digunakan sejumlah Rp.56.133.000,- dan terealisasi sejumlah Rp.51.956.900,- sehingga mempunyai SILPA sejumlah Rp.4.176.100,- dan terdapat efisiensi anggaran sejumlah 7.44% dari yang didapatkan dari sisa anggaran pengadaan barang dan pemakaian anggaran operasional. Target indikator jumlah dokumen pertanggungjawaban anggaran, dan dokumen pelaporan keuangan tahun 2023 sejumlah 63 dokumen, terealisasi sejumlah 63 dokumen. Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN adalah Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

7. KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tabel 3.9

Capaian Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tahun 2023

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja sebelumnya				Capaian Kinerja Tahun 2023			Target Akhir Renstra (2023)	% Capaian 2023 terhadap Target Akhir 2023	Target Nasional 2023	% Capaian 2023 terhadap Target Nasional
			2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian kinerja				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(9/8)	11	12=(11/10)	13	14
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN													
1	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian sesuai standar	NA	NA	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	100%	-	-
2	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	NA	NA	NA	NA	1 paket	1 paket	100%	1 paket	100%	-	-
3	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	NA	NA	NA	NA	1 paket	1 paket	100%	1 paket	100%	-	-
4	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	NA	NA	NA	NA	1 paket	1 paket	100%	1 paket	100%	-	-
5	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	NA	NA	NA	NA	1 paket	1 paket	100%	1 paket	100%	-	-
6	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	NA	NA	NA	NA	1 paket	1 paket	100%	1 paket	100%	-	-
7	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	NA	NA	NA	NA	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	100%	-	-
8	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	NA	NA	NA	NA	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	100%	-	-
9	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	NA	NA	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	100%	-	-
10	Tersedianya mebel	Jumlah mebel yang disediakan	NA	NA	NA	NA	2 unit	2 unit	100%	2 unit	100%	-	-
11	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	NA	NA	NA	NA	2 unit	2 unit	100%	2 unit	100%	-	-
12	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	NA	NA	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	100%	-	-
13	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	NA	NA	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	100%	-	-
14	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	NA	NA	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	100%	-	-
15	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	NA	NA	NA	NA	26 unit	26 unit	100%	26 unit	100%	-	-
16	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	NA	NA	NA	NA	1 unit	1 unit	100%	1 unit	100%	-	-
Rata-rata % capaian kinerja sub kegiatan									100.00%				

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kudus

a) Indikator Kinerja Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian sesuai standar

Capaian realisasi indikator kinerja sub kegiatan Jumlah Laporan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian sesuai standar di tahun 2023 sejumlah 12 dokumen telah mencapai target tahun 2023 sejumlah 12 dokumen. Capaian kinerja tersebut stabil tercapai mulai tahun 2021 s.d 2023, serta telah mencapai target akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018–2023.

Dokumen administrasi kepegawaian yang tersusun di tahun 2023 adalah:

1. SKP ASN Tahun 2023;
2. Evaluasi SKP Triwulanan Tahun 2023;
3. Penetapan SPK NonASN Tenaga Kontrak Tahun 2023;
4. Laporan Kenaikan Pangkat;
5. Pelaporan LHKPN dan LHKASNTahun 2022;
6. Pelaporan SPT Tahunan ASN Tahun 2022;
7. Pelaporan Cuti dan Kehadiran ASN Bulanan Tahun 2023;
8. Pelaporan Pengajuan Pensiun yang diajukan di Tahun 2023;
9. Laporan Kenaikan Gaji Berkala PNS di Tahun 2023;
10. Identifikasi Kebutuhan Diklat/Bimtek Tahun 2023;
11. Dokumen Analisa Jabatan, Peta Jabatan Tahun 2023;
12. Dokumen Analisa Beban Kerja Tahun 2023.

Keberhasilan dalam penyusunan dokumen administrasi kepegawaian adalah :

1. Komitmen yang baik seluruh aparatur dalam melaksanakan pengelolaan data pegawai sesuai dengan standar yang ada;
2. Koordinasi dan komunikasi yang baik antara pengelola kepegawaian maupun dengan Bagian Organisasi, BKPSDM Kabupaten Kudus, dan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri.

Guna pencapaian sasaran kinerja sub kegiatan berupa Jumlah dokumen kepegawaian sesuai standar di tahun 2023, sumber daya anggaran kegiatan yang digunakan sejumlah Rp.5.127.000,- terealisasi sejumlah Rp.4.345.000,- dan mempunyai SILPA sejumlah Rp.872.000,-. Terdapat efisiensi anggaran sejumlah 16.71%. Target indikator jumlah dokumen administrasi kepegawaian tahun 2023 sejumlah 12 dokumen, terealisasi sejumlah 12 dokumen, dengan SILPA dari sisa pengadaan barang/jasa. Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian penyusunan dokumen administrasi kepegawaian sesuai standar adalah Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.

b) Indikator Kinerja Sub Kegiatan: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

Capaian realisasi indikator kinerja sub kegiatan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan di tahun 2023 sejumlah 1 paket telah mencapai target tahun 2023 sejumlah 1 paket. Capaian kinerja tersebut stabil tercapai mulai tahun 2021 s.d 2023, serta telah mencapai target akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018–2023.

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor seluruhnya tercapai 1 paket di tahun 2023.

Guna pencapaian sasaran kinerja sub kegiatan berupa Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor di tahun 2023, sumber daya anggaran sub kegiatan yang digunakan sejumlah Rp.2.284.000,- dan terealisasi sejumlah Rp.2.282.000,- sehingga mempunyai SILPA sejumlah Rp.2.000,-. Terdapat efisiensi anggaran sejumlah 0.09%. Target indikator Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor yang Disediakan sejumlah 1 paket, terealisasi sejumlah 1 paket, dengan SILPA dari pengadaan komponen listrik. Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.

c) Indikator Kinerja Sub Kegiatan: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Capaian realisasi indikator kinerja sub kegiatan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan di tahun 2023 sejumlah 1 paket telah mencapai target tahun 2023 sejumlah 1 paket. Capaian kinerja tersebut stabil tercapai mulai tahun 2021 s.d 2023, serta telah mencapai target akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018–2023.

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan seluruhnya tercapai 1 paket di tahun 2023.

Guna pencapaian sasaran kinerja sub kegiatan berupa Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor di tahun 2023, sumber daya anggaran sub kegiatan yang digunakan sejumlah Rp.18.320.200,- dan terealisasi sejumlah Rp.16.813.500,- sehingga mempunyai SILPA sejumlah Rp.1.506.700,-. Terdapat efisiensi anggaran sejumlah 8.32%. Target indikator Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sebesar 1 paket, terealisasi sejumlah 1 paket, dengan SILPA dari pengadaan perlengkapan kantor. Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

d) Indikator Kinerja Sub Kegiatan: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

Capaian realisasi indikator kinerja sub kegiatan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan di tahun 2023 sejumlah 1 paket telah mencapai target tahun 2023 sejumlah 1 paket. Capaian kinerja tersebut stabil tercapai mulai tahun 2021 s.d 2023, serta telah mencapai target akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018–2023.

Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan seluruhnya tercapai 1 paket di tahun 2023.

Guna pencapaian sasaran kinerja sub kegiatan berupa Tersedianya Peralatan Rumah Tangga di tahun 2023, sumber daya anggaran sub kegiatan yang digunakan sejumlah Rp.17.531.000,- dan terealisasi sejumlah Rp.16.072.000,- sehingga mempunyai SILPA sejumlah Rp.1.459.000,-. Target efisiensi anggaran sejumlah 8.32%. Indikator Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan sebesar 1 paket, terealisasi sejumlah 1 paket, dengan SILPA dari sisa anggaran pengadaan peralatan rumah tangga. Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Tersedianya Peralatan Rumah Tangga adalah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

e) Indikator Kinerja Sub Kegiatan: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

Capaian realisasi indikator kinerja sub kegiatan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan di tahun 2023 sejumlah 1 paket telah mencapai target tahun 2023 sejumlah 1 paket. Capaian kinerja tersebut stabil tercapai mulai tahun 2021 s.d 2023, serta telah mencapai target akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018–2023.

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan seluruhnya tercapai 1 paket di tahun 2023.

Guna pencapaian sasaran kinerja sub kegiatan berupa Tersedianya Bahan Logistik Kantor di tahun 2023, sumber daya anggaran sub kegiatan yang digunakan sejumlah Rp.13.177.000,- dan terealisasi sejumlah Rp.12.189.500,- sehingga mempunyai SILPA sejumlah Rp.987.500,-. Terdapat efisiensi anggaran sejumlah 7.49%. Target indikator Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan sebesar 1 paket, terealisasi sejumlah 1 paket, dengan SILPA dari sisa pengadaan logistik kantor. Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Tersedianya Bahan Logistik Kantor adalah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

f) Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

Capaian realisasi indikator kinerja sub kegiatan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan di tahun 2023 sejumlah 1 paket telah mencapai target tahun 2023 sejumlah 1 paket. Capaian kinerja tersebut stabil tercapai mulai tahun 2021 s.d 2023, serta telah mencapai target akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018–2023.

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan seluruhnya tercapai 1 paket di tahun 2023.

Guna pencapaian sasaran kinerja sub kegiatan berupa Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan di tahun 2023, sumber daya anggaran sub kegiatan yang digunakan sejumlah Rp.19.700.400,- dan terealisasi sejumlah Rp.12.687.262,- sehingga mempunyai SILPA sejumlah Rp.7.013.138,-. Terdapat efisiensi anggaran sejumlah 35.60%. Target indikator Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan sejumlah 1 paket, terealisasi sejumlah 1 paket, dengan SILPA dari pengadaan barang cetakan. Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan adalah Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

g) Indikator Kinerja Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

Capaian realisasi indikator kinerja sub kegiatan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan di tahun 2023 sejumlah 1 dokumen telah mencapai target tahun 2023 sejumlah 1 dokumen. Capaian kinerja tersebut stabil tercapai mulai tahun 2021 s.d 2023, serta

telah mencapai target akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018–2023.

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan seluruhnya tercapai 1 dokumen di tahun 2023.

Guna pencapaian sasaran kinerja sub kegiatan berupa Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan di tahun 2023, sumber daya anggaran sub kegiatan yang digunakan sejumlah Rp.3.600.000,- dan terealisasi sejumlah Rp.3.055.000,- sehingga mempunyai SILPA sejumlah Rp.545.000,-. Target indikator Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan sebesar 1 paket, terealisasi sejumlah 1 paket, dengan SILPA dari langganan koran. Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan adalah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

h) Indikator Kinerja Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Capaian realisasi indikator kinerja sub kegiatan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu di tahun 2023 sejumlah 1 dokumen telah mencapai target tahun 2023 sejumlah 1 dokumen. Capaian kinerja tersebut stabil tercapai mulai tahun 2021 s.d 2023, serta telah mencapai target akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018–2023.

Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu seluruhnya tercapai 1 dokumen di tahun 2023.

Guna pencapaian sasaran kinerja sub kegiatan berupa Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu di tahun 2023, sumber daya anggaran sub kegiatan yang digunakan sejumlah Rp.13.155.360,- dan terealisasi sejumlah Rp.13.052.390,- sehingga mempunyai SILPA sejumlah Rp.102.970,-. Target indikator Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu sebesar 1 paket, terealisasi sejumlah 1 paket, dengan SILPA dari penyediaan fasilitasi kunjungan tamu. Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu adalah Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu.

i) Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Capaian realisasi indikator kinerja sub kegiatan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di tahun 2023 sejumlah 12 laporan telah mencapai target tahun 2023 sejumlah 12 laporan. Capaian kinerja tersebut stabil tercapai mulai tahun 2021 s.d 2023, serta telah mencapai target akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018–2023.

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD seluruhnya tercapai sejumlah 12 laporan di tahun 2023.

Guna pencapaian sasaran kinerja sub kegiatan berupa Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di tahun 2023, sumber daya anggaran sub kegiatan yang digunakan sejumlah Rp.82.948.000,- dan terealisasi sejumlah Rp.82.947.594,- sehingga

mempunyai SILPA sejumlah Rp.406,-. Target indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sejumlah 12 laporan, terealisasi sejumlah 12 laporan, dengan SILPA dari sisa anggaran perjalanan dinas. Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

j) Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah mebeler yang disediakan

Capaian realisasi indikator kinerja sub kegiatan Jumlah mebeler yang disediakan di tahun 2023 sejumlah 2 unit telah mencapai target tahun 2023 sejumlah 2 unit. Capaian kinerja tersebut stabil tercapai mulai tahun 2021 s.d 2023, serta telah mencapai target akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018–2023.

Jumlah mebeler yang disediakan seluruhnya tercapai 2 unit di tahun 2023.

Guna pencapaian sasaran kinerja sub kegiatan berupa Tersedianya mebeler di tahun 2023, sumber daya anggaran sub kegiatan yang digunakan sejumlah Rp.11.076.000,- dan terealisasi sejumlah Rp.10.500.000,- sehingga mempunyai SILPA sejumlah Rp.576.000,-. Target indikator Jumlah mebeler yang disediakan sejumlah 2 unit, terealisasi sejumlah 2 unit, dengan SILPA dari pengadaan mebel. Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Tersedianya mebeler adalah Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.

k) Indikator Kinerja Sub Kegiatan: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

Capaian realisasi indikator kinerja sub kegiatan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan di tahun 2023 sejumlah 2 unit telah mencapai target tahun 2023 sejumlah 2 unit. Capaian kinerja tersebut stabil tercapai mulai tahun 2021 s.d 2023, serta telah mencapai target akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018–2023.

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan seluruhnya tercapai 2 unit di tahun 2023.

Guna pencapaian sasaran kinerja sub kegiatan berupa Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya di tahun 2023, sumber daya anggaran sub kegiatan yang digunakan sejumlah Rp.24.300.000,- dan terealisasi sejumlah Rp.23.980.000,- sehingga mempunyai SILPA sejumlah Rp.320,000,-. Target indikator Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan sejumlah 2 unit, terealisasi sejumlah 2 unit, dengan SILPA dari pengadaan peralatan. Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya adalah Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

l) Indikator Kinerja Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

Capaian realisasi indikator kinerja sub kegiatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan di tahun 2023 sejumlah 12 laporan telah mencapai target tahun 2023 sejumlah 12 laporan. Capaian kinerja tersebut stabil tercapai mulai tahun 2021 s.d 2023, serta telah mencapai target akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018–2023.

Dokumen administrasi laporan penggunaan jasa penunjang urusan administrasi kependudukan yang tersusun di tahun 2023 adalah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Guna pencapaian sasaran kinerja sub kegiatan berupa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan di tahun 2023, sumber daya anggaran sub kegiatan yang digunakan sejumlah Rp.3.276.000,- dan terealisasi sejumlah Rp.1.216.668,- sehingga mempunyai SILPA sejumlah Rp.2.059.332,-. Target indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sejumlah 12 laporan, terealisasi sejumlah 12 laporan, dengan SILPA dari pemakaian anggaran langganan telepon. Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

m) Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Capaian realisasi indikator kinerja sub kegiatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan di tahun 2023 sejumlah 12 laporan telah mencapai target tahun 2023 sejumlah 12 laporan. Capaian kinerja tersebut stabil tercapai mulai tahun 2021 s.d 2023, serta telah mencapai target akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018–2023.

Dokumen administrasi laporan penggunaan jasa penunjang urusan administrasi kependudukan yang tersusun di tahun 2023 adalah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.

Guna pencapaian sasaran kinerja sub kegiatan berupa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan di tahun 2023, sumber daya anggaran sub kegiatan yang digunakan sejumlah Rp.11.910.000,- dan terealisasi sejumlah Rp.11.841.550,- sehingga mempunyai SILPA sejumlah Rp.68,450,-. Target indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sejumlah 12 laporan, terealisasi sejumlah 12 laporan, dengan SILPA dari pemakaian pemeliharaan peralatan kantor. Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

n) Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Capaian realisasi indikator kinerja sub kegiatan Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum di tahun 2023 sejumlah 12 laporan telah mencapai target tahun 2023 sejumlah 12 laporan. Capaian kinerja tersebut stabil tercapai mulai tahun 2021 s.d 2023, serta telah mencapai target akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018–2023.

Dokumen administrasi laporan penggunaan jasa penunjang urusan administrasi kependudukan yang tersusun di tahun 2023 adalah Laporan Penyediaan Jasa Umum.

Guna pencapaian sasaran kinerja sub kegiatan berupa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum di tahun 2023, sumber daya anggaran sub kegiatan yang digunakan sejumlah Rp. 358.470.000,- dan terealisasi sejumlah Rp.352.562.390,- sehingga mempunyai SILPA sejumlah Rp.5.907.610,-. Target indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum sejumlah 12 laporan, terealisasi sejumlah 12 laporan, dengan SILPA dari penggunaan jasa pelayanan umum kantor. Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

o) Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

Capaian realisasi indikator kinerja sub kegiatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya sejumlah 26 unit telah mencapai target tahun 2023 sejumlah 26 unit. Capaian kinerja tersebut stabil tercapai mulai tahun 2021 s.d 2023, serta telah mencapai target akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018–2023.

Laporan pemeliharaan barang milik daerah sesuai ketentuan di tahun 2023 adalah Laporan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya.

Guna pencapaian sasaran kinerja sub kegiatan berupa jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah di tahun 2023, sumber daya anggaran kegiatan yang digunakan sejumlah Rp.113.507.750,- dan terealisasi sejumlah Rp.107.971.721,- sehingga terdapat SILPA pemeliharaan kendaraan dinas, melalui efektifitas penggunaan kendaraan dinas yang ada sehingga meminimalisir biaya perawatan yang tinggi sejumlah Rp.5.536.029,-. Target indikator Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya sejumlah 26 unit, terealisasi sejumlah 26 unit.

Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya adalah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

p) Indikator Kinerja Sub Kegiatan: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Capaian realisasi indikator kinerja sub kegiatan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sejumlah 1 unit telah mencapai target tahun 2023 sejumlah 1 unit. Capaian kinerja tersebut telah mencapai target akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018–2023.

Laporan pemeliharaan barang milik daerah sesuai ketentuan di tahun 2023 adalah Laporan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.

Guna pencapaian sasaran kinerja sub kegiatan berupa jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi di tahun 2023, sumber daya anggaran kegiatan yang digunakan sejumlah Rp.13.169.000,- dan terealisasi sejumlah Rp.12.610.000,- sehingga terdapat SILPA pemeliharaan gedung kantor, melalui efektifitas penggunaan gedung kantor dengan baik sehingga meminimalisir biaya perawatan yang tinggi. sejumlah Rp.559.000,-. Target indikator Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sejumlah 1 unit, terealisasi sejumlah 1 unit.

Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi adalah Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

8. SUBKOORDINATOR PINDAH DATANG DAN PENDATAAN PENDUDUK

Tabel 3.10

Capaian Perjanjian Kinerja Sub Koordinator Pindah Datang dan Pendataan Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tahun 2023

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja sebelumnya				Capaian Kinerja Tahun 2023			Target Akhir Renstra (2023)	% Capaian 2023 terhadap Target Akhir 2023	Target Nasional 2023	% Capaian 2023 terhadap Target Nasional
			2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian kinerja				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(9/8)	11	12=(9/11)	13	14
INDIKATOR KINERJA SUB													
1	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penerbitan dokumen pindah dan datang penduduk sesuai standar	9.974 dokumen	8.392 dokumen	9.693 dokumen	9.995 dokumen	9.000 dokumen	5.890 dokumen	65.44%	9.000 dokumen	65.44%	-	-
		Jumlah penerbitan KTP dan KIA sesuai standar	101.883 dokumen	109.888 dokumen	117.541 dokumen	75.104 dokumen	90.000 dokumen	108.199 dokumen	120.22%	90.000 dokumen	120.22%	-	-
		Jumlah penerbitan dokumen Kartu Keluarga	NA	NA	NA	NA	70.000 dokumen	53.214 dokumen	76.02%	70.000 dokumen	76.02%	-	-
		Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	100%	-	-
Rata-rata % capaian kinerja sub kegiatan									90.42%				

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kudus

a) Indikator Kinerja Sub Kegiatan: Jumlah penerbitan dokumen pindah dan datang penduduk sesuai standar

Capaian realisasi Jumlah penerbitan dokumen pindah dan datang penduduk sesuai standar Tahun 2023 sejumlah 5.890 dokumen tidak mencapai target tahun 2023 sejumlah 9.000 dokumen. Capaian realisasi Jumlah penerbitan dokumen pindah dan datang penduduk sesuai standar mengalami trend menurun mulai tahun 2019 s.d 2023. Hal ini disebabkan,

penerbitan dokumen pindah/datang yang ditargetkan tidak bisa dintervensi peningkatannya karena banyak sedikitnya tergantung dengan peristiwa kependudukan mutasi penduduk itu sendiri. Yang bisa ditingkatkan adalah pencatatan pemutakhiran data penduduk yang sudah berdomisili 1 tahun di Kabupaten Kudus agar melakukan pindah domisili KK ke Kab. Kudus.

b) Indikator Kinerja Sub Kegiatan: Jumlah penerbitan KTP dan KIA sesuai standar

Capaian realisasi Jumlah penerbitan KTP dan KIA sesuai standar Tahun 2023 sejumlah 108.199 dokumen telah melampaui target tahun 2023 sejumlah 90.000 dokumen. Capaian realisasi Jumlah penerbitan KTP dan KIA sesuai standar mengalami trend menurun mulai tahun 2019 s.d 2022. Namun di tahun 2023 capaian realisasi Jumlah penerbitan KTP dan KIA sesuai standar kembali meningkat.

c) Indikator Kinerja Sub Kegiatan: Jumlah penerbitan dokumen Kartu Keluarga sesuai standar

Capaian realisasi Jumlah penerbitan dokumen Kartu Keluarga sesuai standar Tahun 2023 sejumlah 53.214 dokumen belum mencapai target tahun 2023 sejumlah 70.000 dokumen. Capaian realisasi Jumlah penerbitan dokumen Kartu Keluarga sesuai standar belum mencapai target akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 sejumlah 70.000 dokumen.

d) Indikator Kinerja Sub Kegiatan: Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk

Capaian realisasi Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk tahun 2023 sejumlah 12 laporan telah mencapai target tahun 2023 sejumlah 12 laporan. Capaian realisasi Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk tersebut stabil tercapai mulai tahun 2019 s.d 2023 telah mencapai target akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 sejumlah 12 laporan.

9. SUBKOORDINATOR KELAHIRAN DAN KEMATIAN

Tabel 3.11

Capaian Perjanjian Kinerja Sub Koordinator Pindah Datang dan Pendataan Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tahun 2023

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja sebelumnya				Capaian Kinerja Tahun 2023			Target Akhir Renstra (2023)	% Capaian 2023 terhadap Target Akhir 2023	Target Nasional 2023	% Capaian 2023 terhadap Target
			2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian kinerja				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(9/8)	11	12=(9/11)	13	14
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN													
1	Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil (Kelahiran dan Kematian)	Jumlah penerbitan akta kelahiran sesuai standar	22.578 dokumen	17.120 dokumen	17.369 dokumen	17.274 dokumen	18.500 dokumen	17.433 dokumen	94.23%	18.500 dokumen	94.23%	-	-
		Jumlah penerbitan akta kematian sesuai standar	7.274 dokumen	5.911 dokumen	10.801 dokumen	8.824 dokumen	8.900 dokumen	9.094 dokumen	102.18%	8.900 dokumen	102.18%	-	-
Rata-rata % capaian kinerja sub kegiatan									98.21%				

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kudus

a) Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah penerbitan akta kelahiran sesuai standar

Capaian realisasi Jumlah penerbitan akta kelahiran sesuai standar Tahun 2023 sejumlah 17.433 dokumen belum mencapai target tahun 2023 sejumlah 18.500 dokumen. Capaian realisasi Jumlah penerbitan akta kelahiran sesuai standar mengalami trend menurun mulai tahun 2019 s.d 2020 dan mulai meningkat mulai tahun 2021 s.d 2023. Hal ini disebabkan karena penduduk belum melakukan pengurusan Akta Kelahiran karena belum memahami arti pentingnya dokumen akta kelahiran.

b) Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah penerbitan akta kematian sesuai standar

Capaian realisasi Jumlah penerbitan akta kematian sesuai standar Tahun 2023 sejumlah 9.094 dokumen telah melampaui target tahun 2023 sejumlah 8.900 dokumen. Capaian realisasi Jumlah penerbitan akta kematian menurun mulai tahun 2019 s.d 2020 dan meningkat tahun 2021, namun menurun lagi di tahun 2022 dan kembali naik di tahun 2023. Namun capaian cakupan akta kematian secara keseluruhan sebesar 100%. Capaian keberhasilan capaian cakupan akta kematian ditunjang oleh Penerapan Buku Pokok Pemakaman oleh 132 Petugas Register Desa/Kelurahan.

10. SUBKOORDINATOR PERKAWINAN, PERCERAIAN, PERUBAHAN STATUS ANAK DAN KEWARGANEGARAAN

Tabel 3.12

Capaian Perjanjian Kinerja Sub Koordinator Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tahun 2023

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja sebelumnya				Capaian Kinerja Tahun 2023			Target Akhir Renstra (2023)	% Capaian 2023 terhadap Target Akhir 2023	Target Nasional 2023	% Capaian 2023 terhadap Target Nasional
			2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian kinerja				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(9/8)	11	12=(9/11)	13	14
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN													
1	Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil (Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak Dan Pewarganegaraan)	Jumlah penerbitan akta perkawinan sesuai standar	337 dokumen	139 dokumen	126 dokumen	92 dokumen	100 dokumen	73 dokumen	73%	100 dokumen	73%	-	-
		Jumlah penerbitan akta perceraian sesuai standar	31 dokumen	14 dokumen	28 dokumen	8 dokumen	10 dokumen	19 dokumen	190%	10 dokumen	190%	-	-
		Jumlah penerbitan akta pengesahan anak dan pengakuan anak sesuai standar	NA dokumen	NA dokumen	NA dokumen	3 dokumen	3 dokumen	0	0.00%	3 dokumen	0.00%	-	-
		Jumlah pelayanan perubahan status anak	NA dokumen	NA dokumen	NA dokumen	51 dokumen	50 dokumen	49 dokumen	98.00%	50 dokumen	98.00%	-	-
		Jumlah pelayanan penerbitan catatan pinggir akta pencatatan sipil sesuai standar	NA dokumen	NA dokumen	NA dokumen	2790 dokumen	2800 dokumen	3136 dokumen	112.00%	2800 dokumen	112.00%	-	-
Rata-rata % capaian kinerja sub kegiatan									94.60%				

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kudus

a) Indikator Kinerja Sub Kegiatan: Jumlah penerbitan akta perkawinan sesuai standar

Capaian realisasi Jumlah penerbitan akta perkawinan sesuai standar Tahun 2023 sejumlah 73 dokumen belum mencapai target tahun 2023 sejumlah 100 dokumen. Capaian realisasi Jumlah penerbitan akta perkawinan sesuai standar mengalami trend menurun mulai tahun 2019 s.d 2023. Hal ini disebabkan penerbitan dokumen akta perkawinan yang ditargetkan adalah untuk penerbitan akta perkawinan nonmuslim, dan tidak dapat dintervensi peningkatan orang yang menikah karena banyak sedikitnya

tergantung dengan peristiwa perkawinan nonmuslim itu sendiri. Yang bisa ditingkatkan adalah pencatatan pemutakhiran data penduduk kawin baik muslim dan muslim yang akan menjadi komponen capaian kinerja program pada tahun 2024.

b) Indikator Kinerja Sub Kegiatan: Jumlah penerbitan akta perceraian sesuai standar

Capaian realisasi Jumlah penerbitan akta perceraian sesuai standar Tahun 2023 sejumlah 73 dokumen belum mencapai target tahun 2023 sejumlah 100 dokumen. Capaian realisasi Jumlah penerbitan akta kematian menurun mulai tahun 2019 s.d 2020 dan meningkat tahun 2021, namun menurun lagi di tahun 2022 dan kembali naik di tahun 2023. Hal ini disebabkan penerbitan dokumen akta perceraian yang ditargetkan adalah untuk penerbitan akta perceraian nonmuslim, dan tidak dapat dintervensi banyak sedikitnya tergantung dengan peristiwa perceraian nonmuslim itu sendiri. Yang bisa ditingkatkan adalah pencatatan pemutakhiran data penduduk cerai baik muslim dan muslim yang akan menjadi komponen capaian kinerja program pada tahun 2024.

c) Indikator Kinerja Sub Kegiatan: Jumlah penerbitan akta pengesahan anak dan pengakuan anak sesuai standar

Capaian realisasi Jumlah penerbitan akta pengesahan anak dan pengakuan sesuai standar Tahun 2023 sejumlah 0 dokumen belum mencapai target tahun 2023 sejumlah 3 dokumen. Hal ini disebabkan Jumlah penerbitan akta pengesahan anak dan pengakuan sesuai standar dipengaruhi oleh peristiwa pelaporan pengesahan dan pengakuan anak, dimana peristiwa tersebut jarang terjadi.

d) Indikator Kinerja Sub Kegiatan: Jumlah pelayanan perubahan status anak

Capaian realisasi Jumlah pelayanan perubahan status anak Tahun 2023 sejumlah 49 dokumen belum mencapai target tahun 2023 sejumlah 50 dokumen. Capaian realisasi Jumlah pelayanan perubahan status anak menurun dari tahun 2022. Hal ini disebabkan Jumlah pelayanan perubahan status anak dipengaruhi oleh peristiwa pelaporan pengesahan anak, pengakuan anak dan pengangkatan anak, dimana peristiwa tersebut jarang terjadi.

e) Indikator Kinerja Sub Kegiatan: Jumlah pelayanan penerbitan catatan pinggir akta pencatatan sipil sesuai standar

Capaian realisasi Jumlah pelayanan penerbitan catatan pinggir akta pencatatan sipil sesuai standar Tahun 2023 sejumlah 3.136 dokumen telah melampaui target tahun 2023 sejumlah 2800 dokumen. Capaian realisasi pelayanan penerbitan catatan pinggir akta pencatatan sipil sesuai standar meningkat dari tahun 2022. Hal ini disebabkan pelayanan penerbitan catatan pinggir akta pencatatan sipil sesuai standar dipengaruhi oleh peristiwa Catatan Pinggir (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian) yang dibuat karena rusak, hilang, dan pembetulan data, dimana peristiwa tersebut sering terjadi.

11. SUBKOORDINATOR PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Tabel 3.13

Capaian Perjanjian Kinerja Sub Koordinator Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tahun 2023

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja sebelumnya				Capaian Kinerja Tahun 2023			Target Akhir Renstra (2023)	% Capaian 2023 terhadap Target Akhir 2023	Target Nasional 2023	% Capaian 2023 terhadap Target Nasional
			2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian kinerja				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(9/8)	11	12=(9/11)	13	14
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN													
1	Meningkatnya pengelolaan informasi administrasi kependudukan sesuai standar	Jumlah fasilitas sarpras SIAK yang dapat beroperasi sesuai standar	NA	NA	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	-	-	-
		Jumlah laporan pengelolaan TIK SIAK yang dapat beroperasi sesuai standar	NA	NA	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	-	-	-
		Jumlah penyajian data kependudukan	NA	NA	NA	NA	3 dokumen	3 dokumen	100.00%	3 dokumen	-	-	-
		Jumlah laporan pengelolaan sistem dan basis data SIAK sesuai standar	NA	NA	NA	NA	4 laporan	4 laporan	100.00%	4 laporan	-	-	-
Rata-rata % capaian kinerja sub kegiatan									100.00%				

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kudus

a) Indikator Kinerja Sub Kegiatan: Jumlah fasilitas sarpras SIAK yang dapat beroperasi sesuai standar

Capaian realisasi indikator kinerja sub kegiatan Jumlah fasilitas sarpras SIAK yang dapat beroperasi sesuai standar di tahun 2023 sejumlah 12 laporan telah mencapai target tahun 2023 sejumlah 12 laporan. Capaian kinerja tersebut telah mencapai target akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018–2023.

b) Indikator Kinerja Sub Kegiatan: Jumlah laporan pengelolaan TIK SIAK yang dapat beroperasi sesuai standar

Capaian realisasi indikator kinerja sub kegiatan Jumlah laporan pengelolaan TIK SIAK yang dapat beroperasi sesuai standar di tahun 2023 sejumlah 12 laporan telah mencapai target tahun 2023 sejumlah 12 laporan. Capaian kinerja tersebut telah mencapai target akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018–2023.

c) Indikator Kinerja Sub Kegiatan: Jumlah penyajian data kependudukan

Capaian realisasi indikator kinerja sub kegiatan Jumlah penyajian data kependudukan di tahun 2023 sejumlah 3 dokumen telah mencapai target tahun 2023 sejumlah 3 dokumen. Capaian kinerja tersebut telah mencapai target akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018–2023.

d) Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah laporan pengelolaan sistem dan basis data SIAK sesuai standar

Capaian realisasi indikator kinerja sub kegiatan Jumlah laporan pengelolaan sistem dan basis data SIAK sesuai standar di tahun 2023 sejumlah 4 laporan telah mencapai target tahun 2023 sejumlah 4 laporan. Capaian kinerja tersebut telah mencapai target akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018–2023.

12.SUBKOORDINATOR KERJASAMA DAN INOVASI PELAYANAN

Tabel 3.14

Capaian Perjanjian Kinerja Sub Koordinator Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tahun 2023

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja sebelumnya				Capaian Kinerja Tahun 2023			Target Akhir Renstra (2023)	% Capaian 2023 terhadap Target Akhir 2023	Target Nasional 2023	% Capaian 2023 terhadap Target Nasional
			2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian kinerja				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(9/8)	11	12=(11/10)	13	14
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN													
1	Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan data kependudukan sesuai standar	Jumlah penyajian data agregat kependudukan lintas sektoral sesuai standar	NA	NA	NA	NA	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	-	-	-
		Jumlah Perjanjian Kerja Sama baru terkait pemanfaatan data kependudukan sesuai standar	NA	NA	NA	NA	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	-	-	-
		Jumlah laporan hak akses data kependudukan	NA	NA	NA	NA	15 laporan/PD	11 laporan/PD	73.33%	15 laporan/PD	-	-	-
		Jumlah proposal inovasi pelayanan administrasi kependudukan	NA	NA	NA	NA	2 inovasi/proposal	2 inovasi/proposal	100.00%	2 inovasi/proposal	-	-	-
Rata-rata % capaian kinerja sub kegiatan									93.33%				

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kudus

a) Indikator Kinerja Sub Kegiatan: Jumlah penyajian data agregat kependudukan lintas sektoral sesuai standar

Capaian realisasi indikator kinerja sub kegiatan Jumlah penyajian data agregat kependudukan lintas sektoral sesuai standar di tahun 2023 sejumlah 12 laporan telah mencapai target tahun 2023 sejumlah 12 laporan. Capaian kinerja tersebut telah mencapai target akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018–2023.

b) Indikator Kinerja Sub Kegiatan: Jumlah Perjanjian Kerja Sama baru terkait pemanfaatan data kependudukan sesuai standar

Capaian realisasi indikator kinerja sub kegiatan Jumlah Perjanjian Kerja Sama baru terkait pemanfaatan data kependudukan sesuai standar di tahun 2023 sejumlah 4 dokumen telah mencapai target tahun 2023 sejumlah 4 dokumen. Capaian kinerja tersebut telah mencapai target akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018–2023. Telah terdapat upaya penambahan baru PKS pemanfaatan data kependudukan dengan 9 Kecamatan yang diusulkan ke Dirjen Dukcapil Kemendagri pada bulan Sept-Okt 2023, akan tetapi s.d akhir tahun 2023 belum turun persetujuan PKS tersebut.

c) Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah laporan hak akses data kependudukan

Capaian realisasi indikator kinerja sub kegiatan Jumlah laporan hak akses data kependudukan di tahun 2023 sejumlah 15 Laporan/PD belum mencapai target tahun 2023 sejumlah 11 Laporan/PD. Capaian kinerja tersebut belum mencapai target akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018–2023.

d) Indikator Kinerja Sub Kegiatan : Jumlah proposal inovasi pelayanan administrasi kependudukan

Capaian realisasi indikator kinerja sub kegiatan Jumlah laporan hak akses data kependudukan di tahun 2023 sejumlah 2 inovasi/proposal telah mencapai target tahun 2023 sejumlah 2 inovasi/proposal. Capaian kinerja tersebut telah mencapai target akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018–2023.

B. AKUNTABILITAS ANGGARAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka diaplikasikan ke dalam program/kegiatan yang telah direncanakan melalui sumber daya yang dimiliki baik anggaran, sumber daya manusia dan sarana prasarana.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023, dimana secara ringkas komposisi anggaran dan realisasi belanja dirinci menurut jenis belanja dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.15
Anggaran dan Realisasi Belanja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2023
Dirinci Menurut Jenis Belanja

BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%	SILPA	
	(Rp.)	(Rp.)		(Rp.)	%
Belanja Daerah (APBD Kab. Kudus)	9.340.245.568	8.860.086.320	94.86%	480.159.248	5.14%
a. Gaji dan TPP	4.121.007.000	3.876.662.399	94.07%	244.344.601	5.93%
b. Non Gaji dan TPP	5.219.238.568	4.983.423.921	95.48%	235.814.647	4.52%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kudus

Pada tahun 2023 dari anggaran Belanja Non Gaji dan TPP sebesar Rp.5.219.238.568.00 dapat terserap sebesar Rp.4.983.423.921.00 untuk mendanai pencapaian 2 indikator kinerja sasaran (Indikator Kinerja Utama) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus melalui 4 program utama yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk; Program Pelayanan Pencatatan Sipil; Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

Adapun anggaran, realisasi dan efisiensi per masing-masing sasaran strategis (IKU) tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana Tabel 3.16 berikut :

Tabel 3.16
Evaluasi Kinerja dan Anggaran Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Evaluasi Kinerja			Akuntabilitas Keuangan		SILPA		% Efisiensi	
		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi				
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan	<p>Tingkat cakupan penyelenggaraan administrasi kependudukan</p> <p><u>Program :</u></p> <p>1. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk</p> <p>2. Program Pelayanan Pencatatan Sipil</p> <p>3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data</p>	100%	99.87%	99.87%	4.377.203.038	4.226.035.868	151.167.170	3.45%	3.33%	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	<p>Nilai evaluasi Sistim Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah</p> <p><u>Program :</u></p> <p>1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p>	83	73.35	88.37%	4.963.042.530	4.634.050.452	328.992.078	6.63%	-5.00%	
Jumlah						9.340.245.568	8.860.086.320	480.159.248		
Rata-rata % capaian kinerja						94.04%		5.04%		

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kudus

C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pencapaian Kinerja

Berdasarkan Tabel 3.12 diketahui bahwa pencapaian sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kudus pada tahun 2023 belum mencapai target IKU yang telah ditetapkan.

Efisiensi diperoleh apabila realisasi kinerja mencapai target/melampaui target kinerja yang ditetapkan dan terdapat sisa sumber daya keuangan.

Realisasi penggunaan anggaran yang digunakan menunjang pencapaian sasaran kinerja sejumlah Rp.8.860.086.320.00 jika dibandingkan dengan pagu anggaran yang ditetapkan sejumlah Rp.9.340.245.568.00 sehingga terdapat SILPA anggaran sebesar Rp.480.159.248 (5.04%). SILPA tersebut dihasilkan melalui :

1. Efisiensi harga pengadaan barang/jasa;
2. Sisa anggaran TPP dan gaji;
3. Efektivitas penggunaan sumber daya yang ada.

Realisasi penyerapan anggaran belanja Non Gaji dan TPP adalah sebanyak Rp.4.983.423.921.00 (95.48% dari anggaran) dimana anggaran yang tersedia sebanyak Rp.5.219.238.568.00. Terdapat 4.52% sisa anggaran belanja Non Gaji dan TPP, dimana anggaran tersebut merupakan hasil efisiensi pengadaan barang/jasa OPD tahun 2023, serta efektifitas pemakaian sumber daya (anggaran. bahan operasional. sarpras pelayanan). Adapun rincian analisis efisiensi masing-masing sasaran strategis, program, kegiatan dan subkegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.17.

Tabel 3.17
AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023

Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja IKU OPD 2023			Anggaran 2023	Realisasi 2023	SILPA (Rp.)	% Efisiensi	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Capaian Kinerja Prog/Keg 2023			Akuntabilitas Keuangan 2023				Efisiensi (%)	Analisis
		Target	Realisasi	% Capaian Kinerja							Target	Realisasi	% Capaian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	SILPA (Rp.)	% Realisasi		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan	Tingkat cakupan penyelenggaraan administrasi kependudukan	100%	99.87%	99.87%	4,377,203,038	4,226,035,868	151,167,170	3.33%	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100%	99.66%	99.66%	2,779,538,260	2,656,033,826	123,504,434	95.56%	4.10%	Capaian kinerja program sejumlah 99.66% belum mencapai target daerah, akan tetapi telah mencapai target nasional kepemilikan KTP tahun 2023 sejumlah 99.40%. Masih terdapat penduduk yang belum memiliki KTP karena penduduk tersebut belum melakukan perekaman KTP yang terdiri dari wajib KTP usia pemula, penduduk domisili luar negeri, dan penduduk yang tidak diketahui keberadaannya ketika diundang untuk melakukan perekaman KTP.
									Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk sesuai standar	169.000 lbr	167.303 lbr	99.00%	2,779,538,260	2,656,033,826	123,504,434	95.56%	3.44%	Capaian output kegiatan belum tercapai karena sedikitnya jumlah penerbitan dokumen pindah/datang penduduk. Adapun penerbitan KTP dan KIA sudah melampaui target yang ditetapkan.
									Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah penerbitan dokumen pindah dan datang penduduk sesuai standar Jumlah penerbitan KTP dan KIA sesuai standar Jumlah penerbitan dokumen Kartu Keluarga sesuai standar Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	9.000 dokumen 90.000 dokumen 70.000 dokumen 12 laporan	5.890 dokumen 108.199 dokumen 53.214 dokumen 12 laporan	65.44% 120.22% 76.02% 100%	2,779,538,260	2,656,033,826	123,504,434	95.56%	-10.19%	Capaian output subgiat ada yang tercapai sesuai target, melebihi target dan belum mencapai target. Penerbitan dokumen pindah/datang yang ditargetkan tidak bisa diintervensi peningkatannya karena banyak sedikitnya tergantung dengan peristiwa kependudukan mutasi penduduk itu sendiri. Yang bisa ditingkatkan adalah pencatatan pemutakhiran data penduduk yang sudah berdomisili 1 tahun di Kabupaten Kudus agar melakukan pindah domisili KK ke Kab. Kudus.
									Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	100%	99.96%	99.96%	782,089,028	771,785,398	10,303,630	98.68%	1.28%	Target kinerja program belum tercapai, karena masih terdapat penduduk usia 0-18 tahun yang belum melaporkan pencatatan kelahiran. Walaupun realisasi program 99.96% belum mencapai target daerah, tetapi capaian tersebut telah mencapai target nasional kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun 2023 sejumlah 98%.

Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja IKU OPD 2023			Anggaran 2023	Realisasi 2023	SILPA (Rp.)	% Efisiensi	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Capaian Kinerja Prog/Keg 2023			Akuntabilitas Keuangan 2023				Efisiensi (%)	Analisis
		Target	Realisasi	% Capaian Kinerja							Target	Realisasi	% Capaian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	SILPA (Rp.)	% Realisasi		
									Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil sesuai standar	33.930 lbr	29.775 lbr	87.75%	782,089,028	771,785,398	10,303,630	98.68%	-10.93%	Capaian output kegiatan belum tercapai karena berdasarkan laporan peristiwa kependudukan yang terjadi. Yang dapat diintervensi adalah agar peristiwa kependudukan (kelahiran, kematian, dll) yang terjadi, segera dilaporkan untuk dilakukan pencatatan sipil untuk diterbitkan akta pencatatan sipil. Penurunan jumlah penerbitan ini disebabkan turunnya jumlah penerbitan akta kelahiran.
									Peningkatan pelayanan pencatatan sipil	Jumlah penerbitan dokumen akta perkawinan sesuai prosedur Jumlah penerbitan akta kelahiran dan kematian sesuai standar Jumlah penerbitan dokumen akta perceraian sesuai prosedur Jumlah penerbitan perubahan data peristiwa penting sesuai prosedur Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	130 dokumen 33.000 dokumen 30 dokumen 770 dokumen 5 Layanan	73 dokumen 26.527 dokumen 19 dokumen 3.136 dokumen 5 Layanan	56.15% 80.38% 63.33% 407.27% 100%	782,089,028	771,785,398	10,303,630	98.68%	-18.71%	Capaian output subgiat ada yang tercapai sesuai target, melebihi target dan belum mencapai target. Penerbitan dokumen akta perkawinan/perceraian yang ditargetkan adalah untuk penerbitan akta perkawinan nonmuslim, shg tidak bisa diintervensi banyak sedikitnya tergantung dengan peristiwa perkawinan nonmuslim itu sendiri. Yang bisa ditingkatkan adalah pencatatan pemutakhiran data penduduk kawin baik muslim dan muslim yang akan menjadi komponen capaian kinerja program pada tahun 2024.
									Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Cakupan pengelolaan database kependudukan	100%	100%	100%	815,575,750	798,216,644	17,359,106	97.87%	2.13%	Target kinerja program telah tercapai, dan terdapat SILPA - efisiensi anggaran dalam pencapaian kinerja yang berasal dari efektivitas penggunaan anggaran dan pengadaan barang/jasa.
									Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah instansi yang memanfaatkan data kependudukan sesuai standar	15 instansi	11 instansi	73.33%	815,575,750	798,216,644	17,359,106	97.87%	-24.54%	Capaian output kegiatan belum tercapai. Telah terdapat upaya penambahan baru PKS memanfaatkan data kependudukan dengan 9 Kecamatan yang diusulkan ke Dirjen Dukcapil Kemendagri pada bulan Sept-Okt 2023, akan tetapi s.d akhir tahun 2023 belum turun persetujuan PKS tersebut.
									Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah penyajian dan penyusunan buku/data kependudukan Jumlah laporan fasilitasi penyediaan sarpras SIAK sesuai standar Jumlah fasilitasi pengelolaan sistem dan basis data SIAK Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3 dokumen 12 dokumen 1 dokumen 12 laporan	3 dokumen 12 dokumen 1 dokumen 12 laporan	100% 100% 100% 100%	815,575,750	798,216,644	17,359,106	97.87%	2.13%	Capaian output subgiat telah tercapai, dan terdapat SILPA anggaran subgiat

Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja IKU OPD 2023			Anggaran 2023	Realisasi 2023	SILPA (Rp.)	% Efisiensi	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Capaian Kinerja Prog/Keg 2023			Akuntabilitas Keuangan 2023				Efisiensi (%)	Analisis
		Target	Realisasi	% Capaian Kinerja							Target	Realisasi	% Capaian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	SILPA (Rp.)	% Realisasi		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP OPD	83	73.35	88.37%	4,963,042,530	4,634,050,452	328,992,078	-5.00%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM atas kinerja perangkat daerah (Dukcapil)	92%	99.79%	108.47%	4,963,042,530	4,634,050,452	328,992,078	93.37%	15.10%	Realisasi kinerja program telah melampaui target IKM Tahun 2023, dengan didukung efektifitas pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
									Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai standar	48 dokumen	48 dokumen	100%	74,260,820	73,261,478	999,342	98.65%	1.35%	Terdapat efisiensi sumber dana atas realisasi kinerja kegiatan yang mencapai target kinerja kegiatan, dan adanya efektivitas pelaksanaan tugas dan sumber daya yang ada dalam pencapaian target kinerja.
									Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, dokumen anggaran, dokumen pelaporan kegiatan/kinerja yang tersusun sesuai standar	19 dokumen	19 dokumen	100%	45,672,520	45,149,478	523,042	98.85%	1.15%	SILPA penyediaan bahan operasional kegiatan
									Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jmh dok evaluasi OPD (Evaluasi Renstra, Evaluasi Renja Triwulanan, Evaluasi Capaian Kinerja Triwulanan, Evaluasi Rencana Aksi Triwulanan, Lapo Capaian Output Dok Kependudukan Triwulanan, Lap Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran/TEPRA bulanan	29 dokumen	29 dokumen	100%	28,588,300	28,112,000	476,300	98.33%	1.67%	SILPA penyediaan bahan operasional kegiatan
									Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pertanggungjawaban anggaran, dan dokumen pelaporan keuangan yang tersusun sesuai standar	63 dokumen	63 dokumen	100%	4,177,140,000	3,876,662,399	300,477,601	92.81%	7.19%	Terdapat efisiensi sumber dana atas realisasi kinerja kegiatan yang mencapai target kinerja kegiatan
									Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	325 orang/bulan	325 orang/bulan	100%	4,121,007,000	3,824,705,499	296,301,501	92.81%	7.19%	SILPA pembayaran gaji dan TPP.
									Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jmh dok adm pertanggungjawaban keu (Lap SPJ Fungsional SKPD Bulanan; Lap SPJ Administratif SKPD Bulanan; Lap Prognosis Semesteran; Lap Keu SKPD Th 2022; Lap Rekap Daftar Transaksi Harian(DTH) Pajak SKPD Bulanan; Lap Pajak Daerah SKPD Bulanan; Lap Buku Pajak per Jenis Pajak Bulanan	63 dokumen	63 dokumen	100%	56,133,000	51,956,900	4,176,100	92.56%	7.44%	SILPA penyediaan operasional administrasi keuangan.
									Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kepegawaian sesuai standar	12 dokumen	12 dokumen	100%	5,217,000	4,345,000	872,000	83.29%	16.71%	Terdapat efisiensi sumber dana atas realisasi kinerja kegiatan yang mencapai target kinerja kegiatan.
									Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian sesuai standar	12 laporan	12 laporan	100%	5,217,000	4,345,000	872,000	83.29%		Sisa pengadaan barang/jasa
									Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	100%	100%	100%	170,715,960	159,099,246	11,616,714	93.20%	6.80%	Terdapat efisiensi sumber dana atas realisasi kinerja kegiatan yang mencapai target kinerja kegiatan.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%	2,284,000	2,282,000	2,000	99.91%	0.09%	SILPA pengadaan komponen listrik									

Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja IKU OPD 2023			Anggaran 2023	Realisasi 2023	SILPA (Rp.)	% Efisiensi	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Capaian Kinerja Prog/Keg 2023			Akuntabilitas Keuangan 2023				Efisiensi (%)	Analisis
		Target	Realisasi	% Capaian Kinerja							Target	Realisasi	% Capaian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	SILPA (Rp.)	% Realisasi		
									Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%	18,320,200	16,813,500	1,506,700	91.78%	8.22%	SILPA pengadaan perlengkapan kantor
									Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%	17,531,000	16,072,000	1,459,000	91.68%	8.32%	SILPA pengadaan peralatan rumah tangga
									Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%	13,177,000	12,189,500	987,500	92.51%	7.49%	SILPA pengadaan logistik kantor
									Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%	19,700,400	12,687,262	7,013,138	64.40%	35.60%	SILPA pengadaan barang cetakan
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	100%	3,600,000	3,055,000	545,000	84.86%	15.14%	SILPA langganan koran
									Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	100%	13,155,360	13,052,390	102,970	99.22%	0.78%	SILPA penyediaan fasilitas kunjungan tamu
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 laporan	12 laporan	100%	82,948,000	82,947,594	406	100.00%	0.00%	Sisa anggaran perjalanan dinas
									Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan peralatan kantor sesuai ketentuan	2 unit	2 unit	100%	35,376,000	34,480,000	896,000	97.47%	2.53%	Terdapat efisiensi sumber dana atas realisasi kinerja kegiatan yang mencapai target kinerja kegiatan.
									Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	2 unit	100%	11,076,000	10,500,000	576,000	94.80%	5.20%	SILPA pengadaan mebel.
									Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	2 unit	100%	24,300,000	23,980,000	320,000	98.68%	1.32%	SILPA pengadaan peralatan.
									Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan administrasi kependudukan	12 laporan	12 laporan	100%	373,656,000	365,620,608	8,035,392	97.85%	2.15%	Terdapat efisiensi sumber dana atas realisasi kinerja kegiatan yang mencapai target kinerja kegiatan.
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%	3,276,000	1,216,668	2,059,332	37.14%	62.86%	SILPA pemakaian anggaran langganan telepon
									Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%	11,910,000	11,841,550	68,450	99.43%	0.57%	SILPA pemakaian pemeliharaan peralatan kantor.
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%	358,470,000	352,562,390	5,907,610	98.35%	1.65%	SILPA penggunaan jasa pelayanan umum kantor.
									Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	26 unit	26 unit	100%	126,676,750	120,581,721	6,095,029	95.19%	4.81%	Terdapat efisiensi sumber dana atas realisasi kinerja kegiatan yang mencapai target kinerja kegiatan.
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	26 unit	26 unit	100%	113,507,750	107,971,721	5,536,029	95.12%	4.88%	Terdapat SILPA pemeliharaan kendaraan dinas, melalui efektifitas penggunaan kendaraan dinas yang ada sehingga meminimalisir biaya perawatan yang tinggi.
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100%	13,169,000	12,610,000	559,000	95.76%	4.24%	Terdapat SILPA pemeliharaan gedung kantor, melalui efektifitas penggunaan gedung kantor dengan baik sehingga meminimalisir biaya perawatan yang tinggi.
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA UTAMA (IKU)				94.12% (Sangat Tinggi)										9,340,245,568	8,860,086,320	480,159,248	94.86%		

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kudus
Catatan : Efisiensi penggunaan sumber daya diperoleh sesuai regulasi PMK

D. Prestasi atau Penghargaan

Prestasi yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus s.d tahun 2023 adalah :

Tabel 3.18
Penghargaan Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2020-2023

Tahun	Penghargaan		
	Tingkat Kabupaten	Tingkat Provinsi	Tingkat Nasional
2020	Perangkat Daerah Kategori SAKIP Terbaik Urutan Pertama Tahun 2020 dengan nilai 80.38	-	a. Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2020 dari Kementerian PAN dan RB b. Pelopor Perubahan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2020 dari Kementerian PAN dan RB
2021	a. Terbaik I Kategori Perangkat Daerah Berkinerja Terbaik Di Kabupaten Kudus Tahun 2020 b. Perangkat Daerah Kategori SAKIP Terbaik Urutan PERTAMA Tahun 2021 dengan nilai 89.64	-	Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Sangat Baik” Tahun 2020 dari Kementerian PAN dan RB
2022	a. Perangkat Daerah Kategori PMPRB Terbaik Urutan Pertama Tahun 2022 dengan nilai 33.78 (93.07%) b. Perangkat Daerah Kategori SAKIP Terbaik Urutan PERTAMA Tahun 2021 dengan nilai 94.35	-	a. Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Sangat Baik” Tahun 2021 dari Kementerian PAN dan RB b. Kepatuhan Tinggi dengan nilai 82.36 (Zona Hijau) Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 Ombudsman Republik Indonesia
2023	a. Perangkat Daerah Kategori SAKIP Terbaik Urutan PERTAMA Tahun 2023 dengan nilai 73.35	-	c. Kepatuhan Tinggi dengan nilai 97.37 (Zona Hijau) Standar Pelayanan Publik Tahun 2023 Ombudsman Republik Indonesia

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM

Berdasar Tabel 3.2, Capaian kinerja organisasi IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus tahun 2023 secara umum belum mencapai setiap target yang telah ditetapkan di tahun 2023, akan tetapi dari persentase rata-rata capaian IKU tahun 2023 adalah 94.12% (predikat sangat tinggi).

Sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan yang diukur melalui indikator Tingkat cakupan penyelenggaraan administrasi kependudukan telah tercapai 99.87% dari target akhir renstra 100%. sehingga persentase capaian kinerja adalah 99.87% (Predikat Sangat Tinggi). Persentase tingkat cakupan penyelenggaraan administrasi kependudukan tahun 2019 s.d 2023 mengalami trend positif/meningkat dari 97.31% menjadi 99.87%. Kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan yang meningkat menggambarkan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik administrasi kependudukan telah sesuai dengan ketentuan dan Standar Pelayanan Publik (walaupun masih ada kekurangan sedikit yang perlu dibenahi dan ditingkatkan) dan diiringi dengan meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan. Semakin tinggi dan baik kualitas penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan, maka penduduk akan semakin memahami arti pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan yang kemudian akan digunakan sebagai dasar dalam mengakses pelayanan publik yang lainnya. Dokumen administrasi yang menjadi prioritas isu nasional saat ini seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran (prioritas usia 0-18 tahun) dan Akta Kematian, dimana dari segi capaian kepemilikan tahun 2023 telah mencapai dan melampaui target nasional yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat sebagaimana Tabel 3.2.

Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2023 sejumlah 73,35 belum mencapai target IKU 2023 dan target akhir Renstra tahun 2021-2023 sejumlah 83, akan tetapi nilai tersebut mendapat Predikat Terbaik I di Kabupaten Kudus di tahun 2023. Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2019 s.d 2022 mengalami trend positif/meningkat dari 80.38 menjadi 94.35. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus sejak tahun 2019 s.d 2023 memperoleh Predikat Terbaik Pertama Implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus. Di tahun 2023 terjadi perubahan pedoman regulasi dalam melaksanakan evaluasi SAKIP dengan mengacu Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 66 Tahun 2021 dimana kategori dan subunsur penilaian berbeda jika dibandingkan dengan evaluasi SAKIP tahun 2022. Sehingga Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2022 tidak dapat diperbandingkan dengan Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2023. Walaupun Nilai Evaluasi SAKIP mengalami trend meningkat dan meraih predikat terbaik, akan tetapi masih perlu perbaikan sebagaimana rekomendasi dari LHE SAKIP Tahun 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Kudus dan Kementerian PAN dan RB.

Capaian kinerja tahun 2023 secara detail per indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan dan pengampu penanggungjawab telah diulas pada Bab III. Adapun efisiensi kinerja dan anggaran per capaian sasaran strategis (IKU), program, kegiatan, dan subkegiatan diulas pada Tabel Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus tahun 2023 pada Bab III.

B. REKOMENDASI PERBAIKAN

Berdasarkan uraian di atas, dan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, maka rekomendasi perbaikan di tahun 2024 adalah:

- 1) Pencapaian Kinerja
 - a) Peningkatan capaian kinerja kepemilikan dokumen kependudukan melalui peningkatan kolaborasi kinerja internal dan eksternal (lintas sektoral) dengan Perangkat Daerah/Instansi lain;
 - b) Peningkatan kerjasama pemafaatan data kependudukan;
 - c) Peningkatan pelayanan jemput bola/stelsel aktif kepada masyarakat;
 - d) Peningkatan sosialisasi kebijakan dan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat;
 - e) Peningkatan kualitas data kependudukan melalui pemutakhiran data kependudukan.
- 2) Perencanaan Kinerja
 - a) Menyusun dokumen Rencana Kerja dengan mendasar pada pohon masalah, dan pohon kinerja yang telah disusun, serta memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja yang telah disusun.
- 3) Perbaikan Budaya Kinerja Organisasi
 - a) Peningkatan komitmen aparatur dalam penyusunan perjanjian kinerja, sasaran kinerja pegawai, rencana aksi;
 - b) Implementasi kode etik pelayanan, pemberian reward pegawai berkinerja secara berkala dan pemberian punishment yang tegas sesuai ketentuan;
 - c) Peningkatan pengukuran kinerja secara berkala dengan berbasis TI;
 - d) Kolaborasi kinerja antar bidang di internal dinas.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2023 disusun. semoga dapat bermanfaat menjadi bahan pertimbangan evaluasi kinerja dan pertimbangan kebijakan organisasi lainnya.

Kudus, 6 Maret 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUDUS



Drs. EKO HARI DJATMIKO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690816 198803 1 001

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023;
2. Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2023.



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Sunan Muria Nomor 9 Kudus Kode Pos 59313
Telp 0291 438813 Fax 0291 437585
email : dukcapil@kuduskab.go.id Website : www.dukcapil.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. EKO HARI DJATMIKO, M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : BERGAS C PENANGGUNGAN, S.SOS, M.Si
Jabatan : Pj. BUPATI KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

BERGAS C PENANGGUNGAN, S.SOS, M.Si

Kudus, 20 Oktober 2023

Pihak Pertama,



Drs. EKO HARI DJATMIKO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690816 198803 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUDUS**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan	1. Tingkat cakupan penyelenggaraan administrasi kependudukan	100,00 %
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	83,00 Nilai

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.963.042.530	
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.779.538.260	
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	782.089.028	
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	815.575.750	
TOTAL		9.340.245.568	

Kudus, 20 Oktober 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL,

Pj. BUPATI KUDUS,



BERGAS C PENANGGUNGAN, S.SOS, M.Si



Drs. EKO HARI DJATMIKO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19690816 198803 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Sunan Muria No.9 Kudus Kode Pos 59313

Telp. (0291) 438813 Faks. (0291) 537585

Email : dukcapil@kuduskab.go.id Website : dukcapil.kuduskab.go.id

Kudus, 9 Januari 2024

Kepada

Nomor : 000.7.6.1/0035/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Evaluasi Pelaksanaan Renja
PD Triwulan IV Tahun 2023

Yth. Pj. Bupati Kudus
cq. Kepala Bappeda Kab. Kudus
di –
Kudus

Menindaklanjuti Surat Kepala Bappeda Kabupaten Kudus tanggal 4 Januari 2024 Nomor 000.7.6.1/020/2024 perihal Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Triwulan IV Tahun 2023, maka bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Evaluasi Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL,



Drs. EKO HARI DJATMIKO, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP.196908161988031001

Tembusan, kepada Yth :

1. Pj. Bupati Kudus (sebagai laporan);
2. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus (sebagai laporan).



Catatan :

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PERIODE PELAKSANAAN : 2023
TRIWULAN IV

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD s/d Tahun 2023 (%)		Ket
			K	Rp.	I	II	III	IV	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
				4.963.043		703.895		1.853.437		815.605		1.261.114		4.634.050		93,37	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Dukcapil)	92 indeks		91,24		92,74		95,04		99,79		99,79		100		
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			74.261		19.572		26.843		8.588		18.259		73.261		98,65	
		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai standar	48 dokumen		12,00		9,00		15,00		12,00		48		100		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			45.673		16.852		20.089		3.429		4.779		45.149		98,85	
		Jumlah dokumen perencanaan, dokumen anggaran, dokumen pelaporan kegiatan/kinerja yang tersusun sesuai standar	19 dokumen		5		2,00		9,00		3,00		19		100		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			28.588		2.720		6.754		5.159		13.480		28.112		98,33	
		Jmh dok evaluasi OPD (Evaluasi Renstra, Evaluasi Renja Triwulanan, Evaluasi Capaian Kinerja Triwulanan, Evaluasi Rencana Aksi Thwulanan, Lapo Capaian Output Dok Kependudukan Triwulanan, Lap Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran/TEPRA bulanan	29 dokumen		7		7,00		8,00		7,00		29		100		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.177.140		555.784		1.601.491		720.139		999.248		3.876.662		92,81	
		Jumlah dokumen administrasi pertanggungjawaban anggaran, dan dokumen pelaporan keuangan yang tersusun sesuai standar	63 dokumen		16,00		16,00		15,00		16,00		63		100		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.121.007		550.544		1.575.356		713.474		985.332		3.824.705		92,81	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	325 orang / bulan		75		100,00		75,00		75,00		325		100		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			56.133		5.240		26.136		6.665		13.916		51.957		92,56	
		Jmh dok adm pertanggungjawaban keu (Lap SPJ Fungsional SKPD Bulanan; Lap SPJ Administratif SKPD Bulanan; Lap Prognosis Semesteran; Lap Keu SKPD Th 2022; Lap Rekap Daftar Transaksi Harian(DTH) Pajak SKPD Bulanan; Lap Pajak Daerah SKPD Bulanan; Lap Buku P	63 dokumen		16		16,00		15,00		16,00		63		100		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD s/d Tahun 2023 (%)		Kct
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			5.217		265		4.080		0		0		4.345		83,29	
		Jumlah dokumen kepegawaian sesuai standar	12 dokumen		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00	12		100	
X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			5.217		265		4.080		0		0		4.345		83,29	
		Jumlah Laporan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian sesuai standar	12 laporan		3		3,00		3,00		3,00		3,00	12		100	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			170.716		34.097		39.948		11.744		73.311		159.099		93,2	
		Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	100 %		25,00		25,00		25,00		25,00		25,00	100		100	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.284		932		1.200		150		0		2.282		99,91	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket		0		1,00		0		0		1		100		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			18.320		1.720		5.239		3.873		5.982		16.814		91,78	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		0		0,00		1,00		0		1		100		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			17.531		3.477		7.038		1.177		4.381		16.072		91,68	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		0		0,00		1,00		0		1		100		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			13.177		1.995		2.750		2.523		4.922		12.190		92,51	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		0		0,00		1,00		0		1		100		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Celakan dan Penggandaan			19.700		96		3.348		1.724		7.519		12.687		64,4	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket		0		0,00		1,00		0		1		100		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			3.600		470		1.175		470		940		3.055		84,86	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen		3		3,00		3,00		-8,00		1		100		
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu			13.155		3.259		2.631		1.827		5.336		13.052		99,22	
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 laporan		3		3,00		3,00		3,00		12		100		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			82.948		22.149		16.567		0		44.232		82.948		100	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		3		9,00		0		0		12		100		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			35.376		19.990		3.990		0		10.500		34.480		97,47	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD s/d Tahun 2023 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah pengadaan peralatan kantor sesuai ketentuan	2 unit		0,00		2,00		0		0		2		100		
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			11.076		0		0		0		10.500		10.500			94,8
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit		0		0,00		0		2,00		2		100		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			24.300		19.990		3.990		0		0		23.980			98,68
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		0		2,00		0		0		2		100		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			373.656		64.066		139.608		66.903		95.044		365.621			97,85
		Jumlah laporan penggunaan jasa penunjang urusan administrasi kependudukan	12 laporan		3,00		3,00		3,00		3,00		12		100		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			3.276		216		398		207		396		1.217			37,14
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		3		3,00		3,00		3,00		12		100		
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			11.910		925		3.386		700		6.831		11.842			99,43
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		3		3,00		3,00		3,00		12		100		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			358.470		62.925		135.824		65.996		87.817		352.562			98,35
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		3		3,00		3,00		3,00		12		100		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			126.677		10.122		37.477		8.231		64.751		120.582			95,19
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	26 unit		8,00		1,00		3,00		14,00		26		100		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Penzinaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			113.508		10.122		37.477		8.231		52.141		107.972			95,12
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 unit		8		1,00		3,00		14,00		26		100		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			13.169		0		0		0		12.610		12.610			95,76
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0		0,00		0		1,00		1		100		
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			2.779.538		1.179.350		340.007		281.184		855.493		2.656.034			95,56

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD s/d Tahun 2023 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100 %		97,94		98,31		99,17		99,64		99,64		99,64		
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk			2.779.538		1.179.350		340.007		281.184		855.493		2.656.034		95,56	
		Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk sesuai standar	169000 dokumen		36.621,00		42.758,00		31.669,00		56.255,00		167303		99		
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			2.779.538		1.179.350		340.007		281.184		855.493		2.656.034		95,56	
		Jumlah penerbitan dokumen pindah dan datang penduduk sesuai standar	9000 dokumen		1356		1.507,00		1.530,00		1.497,00		5890		65,44		
		Jumlah penerbitan KTP dan KIA sesuai standar	90000 dokumen		22491		26.822,00		17.263,00		41.623,00		108199		100		
		Jumlah penerbitan dokumen Kartu Keluarga sesuai standar	70000 dokumen		12774		14.423,00		12.873,00		13.144,00		53214		76,02		
		Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	12 Laporan		3		3,00		3,00		3,00		12		100		
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			782.089		107.110		278.681		121.991		264.004		771.785		98,68	
		Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	100 %		99,69		99,41		99,77		99,48		99,48		99,48		
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil			782.089		107.110		278.681		121.991		264.004		771.785		98,68	
		Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil sesuai standar	33930 dokumen		5.828,00		6.686,00		7.105,00		10.156,00		29775		87,75		
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil			782.089		107.110		278.681		121.991		264.004		771.785		98,68	
		Jumlah penerbitan dokumen akta perkawinan sesuai prosedur	130 dokumen		18		6,00		22,00		27,00		73		56,15		
		Jumlah penerbitan akta kelahiran dan kematian sesuai standar	33000 dokumen		5804		6.497,00		7.019,00		7.207,00		26527		80,38		
		Jumlah penerbitan dokumen akta perceraian sesuai prosedur	30 dokumen		6		3,00		5,00		5,00		19		63,33		
		Jumlah penerbitan perubahan data peristiwa penting sesuai prosedur	770 dokumen		0		180,00		59,00		2.897,00		3136		100		
		Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	5 Layanan		0		0,00		5,00		0		5		100		
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			815.576		54.707		172.492		76.525		494.492		798.217		97,87	
		Cakupan pengelolaan database kependudukan	100 %		25		50		75		100		100		100		
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			815.576		54.707		172.492		76.525		494.492		798.217		97,87	
		Jumlah instansi yang memanfaatkan data kependudukan sesuai standar	15 instansi		11,00		0,00		0		0		11		73,33		
2.12.04.2.03.03	Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			815.576		54.707		172.492		76.525		494.492		798.217		97,87	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Reallasi Anggaran Renja OPD s/d Tahun 2023 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=5+6+7+8		10=9/4*100		11
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Jumlah penyajian dan penyusunan buku/data kependudukan	3 dokumen		0		0,00		1,00		2,00		3		100		
		Jumlah laporan fasilitasi penyediaan sarpras SIAK sesuai standar	12 dokumen		3		3,00		3,00		3,00		12		100		
		Jumlah fasilitasi pengelolaan sistem dan basis data SIAK sesuai standar	1 dokumen		0		0,00		0		1,00		1		100		
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan		3		3,00		3,00		3,00		12		100		
JUMLAH				9.340.246		8.860.086							8.860.086				
Rata - rata capaian kinerja OPD (%)															96,99	94,86	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja :</p> <p>1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dari segi sarpras dan kepatuhan pelayanan berdasarkan SOP dan SP 1x24 jam; 2. Inovasi pelayanan administrasi kependudukan melalui layanan KIOS Pakde; 3. Peningkatan kapasitas SDM; 4. Peningkatan pemantauan dan evaluasi program, kegiatan, dan pelayanan langsung ke masyarakat berbasis IT melalui aplikasi PAKSEMOK; 5. Pemberian reward and punishment kepada pegawai; 6. Membuka akses Layanan Pengaduan dan Helpdesk konsultasi; 7. Kolaborasi dengan stakeholder lintas sektor dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan; 8. Pelayanan jemput bola (IKD) ke instansi pemerintah maupun swasta, kecamatan dan MPP; 9. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.</p> <p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja :</p> <p>1. Keterbatasan ketersediaan anggaran untuk peremajaan pengadaan sarpras pelayanan Adminduk (pelayanan di Dinas, 9 Kecamatan, Mall Pelayanan Publik dan Jemput Bola); 2. Belum optimalnya pelayan perekaman dan pencetakan KTP, karena kondisi sarpras yang tidak memadai/rusak dimana umur ekonomisnya lebih dari 10 tahun; 3. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat bahwa Dana Pelayanan Admindukcapil (DAK Nonfisik) APBN Tahun 2023 bagi Kabupaten/Kota tidak lagi diberikan, sehingga mempengaruhi operasional pelayanan Adminduk; 4. Ketersediaan blangko KTP yang disediakan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri melalui mekanisme hibah ke Dinas Dukcapil Kab. Kudus mengalami trend yang semakin menurun sehingga berdampak pada rendahnya penerbitan KTP Tahun 2023; 5. Dampak penerapan dari kebijakan implementasi SIAK Terpusat mulai bulan April Tahun 2022 dari Pemerintah Pusat, Dinas Dukcapil Kab. Kudus memiliki keterbatasan pengelolaan database kependudukan dimana penyajian data kependudukan skala kabupaten terbatas sesuai dengan template yang telah disediakan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : secara keseluruhan capaian kinerja dan penyerapan anggaran tahun 2023 sudah sangat tinggi dan sudah sesuai target, untuk yang belum mencapai target agar dapat ditingkatkan di Tahun yang akan datang</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya Pertahankan Capaian Kinerja dan penyerapan anggaran yang sudah sangat tinggi.</p>																	

Kudus, 2024

Dievaluasi oleh,

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KUDUS



Drs. REVLISANTO SUBEKTI
Pembina Utama Muda
NIP. 19690321 198603 1 006

Kudus, 2024

Disusun oleh,



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUDUS
Drs. EKO HARI DJATMIKO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690816 198803 1 001